

LAPORAN AKHIR **(FINAL REPORT)**

EVALUASI KELEMBAGAAN **ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH** **KOTA BALIKPAPAN**

**KERJASAMA ANTARA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK, FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**



Tim Peneliti:

- 1. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.**
- 2. Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.**
- 3. Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D**
- 4. Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si.**
- 5. Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.AP**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Puji Syukur alhamdulillahirobbil 'alamin kami sampaikan kepada Allah SWT Robb Semesta Alam, atas rahmat, hidayah dan inayah-Ny pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan penyusunan Laporan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan dapat diselesaikan. Kajian evaluasi kelembagaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Kajian ini dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan, menganalisis dan memformulasikan kelembagaan berdasarkan ketiga peraturan diatas. Diharapkan kajian ini dapat meberikan manfaat riil terhadap pengembangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan terutama sebagai dasar dalam membentuk peraturan daerah Kota Balikpapan dalam menentukan tipelogi dan kematangan organisasi perangkat daerah sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan regulasi daerah atas diaturnya tipelogi dan kematangan organisasi perangkat daerah.

Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian yang lebih baik, kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoritis dan pendekatan empiris. Team peneliti menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan kajian serupa dimasa mendatang. Smoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Balikpapan, Desember 2022
Ketua Team Peneliti



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

DAFTAR ISI

	Hlm
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	8
1.3 Desain Penelitian	9
1.4 Metode	10
1.4.1. Jenis dan Pendekatan	10
1.4.2. Sumber Bahan dan Data Lapangan	11
1.4.3. Teknik Pengolahan Bahan dan Data Lapangan	11
1.4.4. Teknik Analisis	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	14
2.1. Governance Theory	14
2.2. Institutionalism Theory	15
2.3. Public Management Theory	15
2.4. New Public Management Theory	16
2.5. New Public Service Theory	16
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DASAR EVALUASI KELEMBAGAAN	18
3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	18
3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	19
3.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	19
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	21
4.1 Instrumen 1	21
4.2 Instrumen 2	83
4.3 Instrumen 3	163
BAB V PENUTUP	209
5.1 Kesimpulan	209
5.2 Rekomendasi	210
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
1	Daftar OPD Pemerintah Kota Balikpapan	21
2	Indikator Penilaian Faktor Umum	23
3	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24
4	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Kesehatan	26
5	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016), Dinas Pekerjaan Umum	28
6	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Perumahan dan Permukiman	30
7	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Satuan Polisi Pamong Praja	31
8	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016), Dinas Sosial	34
9	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Ketenagakerjaan	36
10	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)	37
11	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	40
12	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	47
13	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016), Dinas Lingkungan Hidup	48
14	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	50
15	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Perhubungan	52

16	Tabel 16 Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Komunikasi dan Informatika	54
17	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perindustrian	56
18	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58
19	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60
20	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	60
21	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Perpustakaan Dan Arsip	63
22	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas Perdagangan	65
23	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Sekretariat Daerah	68
24	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Sekretariat Dewan	69
25	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Inspektorat	70
26	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	71
27	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)	73
28	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)	74
29	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Kecamatan Balikpapan Barat	75
30	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Kecamatan Balikpapan Selatan	76

31	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Kecamatan Balikpapan Kota	77
32	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Kecamatan Balikpapan Utara	78
33	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Kecamatan Balikpapan Timur	78
34	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Kecamatan Balikpapan Tengah	79
35	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Badan Keuangan Dan Aset Daerah	80
36	Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Rekapitulasi Tipologi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan hasil Evaluasi Kelembagaan Tahun 2022	81
37	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	83
38	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Kesehatan	85
39	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Pekerjaan Umum	88
40	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Perumahan dan Permukiman	88
41	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Satpol PP	93
42	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Sosial	93
43	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Tenaga Kerja	94
44	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)	96
45	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	99

46	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	102
47	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Lingkungan Hidup	106
48	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	107
49	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Perhubungan	110
50	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Komunikasi dan Informasi	112
51	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Koperasi dan UMKM	113
52	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118
53	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	120
54	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	123
55	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Perpustakaan dan Arsip	126
56	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Perdagangan	128
57	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Sekretariat Daerah	131
58	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Sekretariat Dewan	134
59	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Inspektorat	135
60	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	139

61	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	140
62	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)	143
63	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Kecamatan Balikpapan Barat	148
64	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Kecamatan Balikpapan Selatan	150
65	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Kecamatan Balikpapan Kota	151
66	Table 65 Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Kecamatan Balikpapan Utara	151
67	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Kecamatan Balikpapan Timur	154
68	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Kecamatan Balikpapan Tengah	158
69	Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	159
70	Rata-Rata Kematangan OPD	162
71	Nilai Dimensi	163
72	Struktur Bobot Penilaian	165
73	Daftar OPD Yang Layak Dipecah/Dipisahkan	211

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Halaman
1	Metode Dan Tahapan Kajian Evaluasi Kelembagaan	9
2	Kerangka Berfikir Kajian Evaluasi Kelembagaan	10
3	Tahapan Penentuan Kriteria Tipelogi Organisasi Perangkat Daerah	23
4	Persentase Tipelogi OPD Kota Balikpapan Hasil Evaluasi Kelembagaan Tahun 2022	82

DAFTAR GRAFIK

No	Uraian	Halaman
1	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	168
2	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	171
3	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	174
4	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	177
5	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan	180
6	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	183
7	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Sosial Kota Balikpapan	186
8	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	188
9	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan	191
10	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	194
11	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	197
12	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	201
13	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan	204
14	Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian evaluasi kelembagaan dilakukan dengan memahami lima hal mendasar, yaitu

- a. Paparan konsep perangkat daerah
- b. Langkah pembinaan, pengendalian dana penataan perangkat daerah
- c. Konsep evaluasi kelembagaan institusi pemerintah
- d. Pemahaman konteks pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- e. konsep dasar administrasi pemerintahan

Kelima konsep dasar tersebut akan menjadi guideline sekaligus dasar kerangka berfikir kajian evaluasi kelembagaan. Sehingga integrasi kelima konsep dasar tersebut akan menghasilkan model pemikiran tentang bagaimana memberikan penilaian terkait dengan organisasi perangkat daerah di kabupaten dan kota diseluruh wilayah nusantara.

Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemban fungsi dasar yang dikenal dengan dengan fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan. Fungsi tersebut meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah dibekali dengan wewenang yang dimilikinya. Dimana wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu para penyelenggara negara harus memahami tugas pokok dan fungsi yang diemban. Penyelenggara negara harus mampu melakukan upaya-upaya administrative selama menjalani tugasnya sebagai bagian dari pemerintah. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan

Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan atau Tindakan yang merugikan.

Untuk memaksimalkan tugas yang diemban maka penyelenggara negara harus mampu bersikap profesional dan menghindari munculnya konflik kepentingan. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan atau Tindakan yang dibuat atau dilakukannya.

Disisi lain penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan mengacu pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Khusus Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diuraikan lebih detail, yaitu mencakup beberapa asas lain yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan sering terjadi delegasi wewenang, transformasi wewenang, desentralisasi wewenang dan kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab sepenuhnya kepada penerima delegasi. Oleh karena itu dalam masa transisi sering terjadi penurunan atau kenaikan kualitas layanan. Untuk itu dalam melaksanakan fungsi pemerintahan diperlukan payung hukum yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintah. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; menciptakan

kepastian hukum; mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan; memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik); dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Pemahaman kontek pemerintah juga diperlukan dalam kajian evaluasi kelembagaan; pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kepada pemahaman konsep pemerintah pada tataran yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki berbagai klasifikasi urusan pemerintahan antara lain urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib meliputi urusan berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan perpustakaan; dan kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; transmigrasi.

Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, maka harus memenuhi standar pelayanan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Terkait dengan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. Disamping itu, penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan juga didasarkan pada asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Mengacu pada beberapa poin penting diatas, maka dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah dibantu oleh dinas,

badan ditingkat daerah. Oleh karena itu keberadaan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sangat penting. Paparan diatas menjelaskan bagaimana hubungan dan status urusan pemerintah konren yang terbagi dalam urusan wajib dan pilihan. Maka hal ini menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi kelembagaan. Mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan evaluasi.

Banyak hal yang harus dipahami oleh penyelenggara negara didaerah terkait dengan evaluasi kelembagaan. Diantaranya adalah memahami konsep-konsep dasar pemerintah daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten Kota adalah unsur pembantu bupati atau wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Dalam proses pembentukan Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan berdasarkan beberapa asas mendasar antara lain; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Jenis perangkat daerah provinsi terdiri atas; sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat dinas; dan badan. Sedangkan perangkat daerah kabupaten kota terdiri atas: sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; badan; dan kecamatan.

Salah satu tujuan dilakukannya evaluasi kelembagaan adalah untuk menentukan tipelogi dinas atau badan yang ada di kabupaten kota. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, berikut ini beberapa kertentuannya:

Kriteria tipelogi perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan dasar indikator umum dengan bobot 20% dan indikator teknis dengan bobot 80%. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk; luas wilayah; jumlah anggaran pendapatan dan belanja

daerah. sedangkan kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Organisasi perangkat daerah tentu perlu untuk dilakukan pembinaan, pengendalian dan penataan sehingga perangkat daerah tersebut tetap sehat secara manajemen internal maupun dalam memberikan pelayanan kepada publik. Perlu penegasan terkait dengan substansi konsep pembinaan, pengendalian dan penataan perangkat daerah. Pembinaan penataan perangkat daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern. Sedangkan pengendalian penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, penataan perangkat daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas. Dengan mengacu pada pemahaman, definisi dan konsep dasar dari pembinaan, pengendalian dan penataan perangkat daerah diatas maka langkah ini seyogyanya dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah agar keberadaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sehubungan dengan otoritas pelaksana dari program pembinaan, pengendalian dan penataan perangkat daerah, maka harus mengacu pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan penataan perangkat daerah provinsi dilakukan oleh menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi. Sedangkan pembinaan penataan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat. Dan pembinaan penataan perangkat daerah kabupaten/kota dimonitor oleh menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi. Program ini dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun anggaran.

Sasaran dari program pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, inovasi organisasi. Struktur organisasi meliputi besaran organisasi Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah, perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan tata kerja Perangkat Daerah. Kriteria dari struktur organisasi mengacu atau sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai perangkat daerah setempat. Budaya organisasi merupakan pengembangan nilai, sikap dan perilaku yang mendukung kinerja Perangkat Daerah. Setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan mengenai budaya organisasi yang menjadi pedoman penyusunan budaya organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku. Inovasi organisasi merupakan pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dan setiap pemerintah daerah wajib mendorong pelaksanaan inovasi daerah oleh masing-masing perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi

Keragaman dalam Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk; fasilitasi, konsultasi, penilaian dan penghargaan. Dari keempat ragam pembinaan tersebut, penilaian menjadi salah satu fokus yang cukup penting karena mencakup beberapa kajian antara lain tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi. Disisi lain keragaman pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dalam bentuk: pemantauan, pendampingan, evaluasi.

Mengacu pada kajian-kajian yuridis evaluasi kelembagaan, maka setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah. Evaluasi kelembagaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri dan dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Evaluasi kelembagaan dilakukan secara bertahap dengan rincian tahapan

meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi. Tentu setiap tahapan dilakukan secara komprehensif dan berpedoman pada kaidah-kaidah dan norma kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah terdiri dari dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Sedangkan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi; keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi.

Mengacu pada paparan diatas yang menerangkan konsep konsep perangkat daerah, langkah pembinaan, pengendalian dana penataan perangkat daerah, konsep evaluasi kelembagaan institusi pemerintah, pemahaman konteks pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan konsep dasar administrasi pemerintahan maka reasoning yang paling kuat kenapa diperlukan evaluasi kelembagaan adalah tuntutan kesesuaian antara keberadaan organisasi perangkat daerah, kebutuhan pelayanan publik dan kesehatan organisasi perangkat daerah.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kajian evaluasi kelembagaan ini antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan
- b. Menganalisis desain kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Sementara itu manfaat dari kajian evaluasi kelembagaan berikut:

- a. Sebagai dasar dalam membentuk peraturan daerah Kota Balikpapan dalam menentukan tipologi dan kematangan organisasi perangkat daerah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan daerah atas diaturnya tipologi dan kematangan organisasi perangkat daerah

1.3. Desain Penelitian

Sebagai gambaran dalam mempermudah untuk melakukan kajian dan analisis evaluasi kelembagaan, maka disajikan desain sebagai berikut:

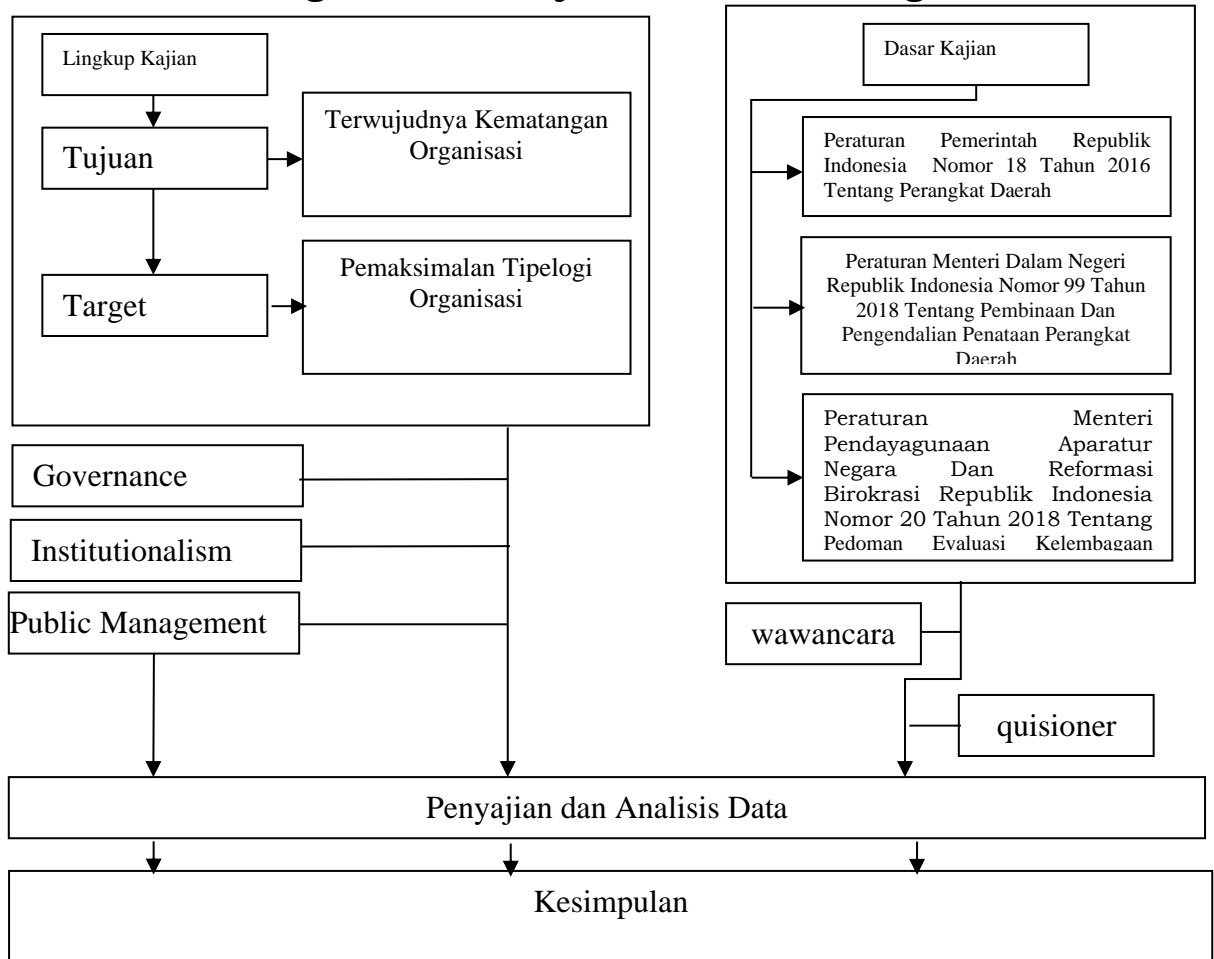
Gambar 1
Metode Dan Tahapan Kajian Evaluasi Kelembagaan



Sumber: Hasil Analisis 2022

Secara substansi kajian evaluasi kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengkonstruksikan kajian melalui keranga berfikir sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Berfikir Kajian Evaluasi Kelembagaan



Sumber: Hasil Analisis 2022

1.4. Metode

1.4.1. Jenis dan Pendekatan

Kajian tentang Evaluasi Kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan merupakan kajian ilmiah dengan memadukan pendekatan teoritis dan empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah socio legal yaitu dengan meneliti fakta-fakta di lapangan dengan mengetahui hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi organisasi perangkat daerah. Sehingga hasilnya menjadi salah satu bahan

untuk dilakukan analisis melalui respon sumber data melalui interview dan dilengkapi dengan data berupa eviden.

1.4.2. Sumber Bahan dan Data Lapangan

Sumber bahan dalam melakukan kajian ini adalah berasal dari sumber bahan sekunder, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan (3). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Data lapangan diperoleh langsung di lapangan dari 34 Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan melalui interaksi, koordinasi dan *directly interview* dengan *key informants* dan *informants* yang merupakan representasi OPD. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terkait dengan data-data sekunder seperti faktor umum (indikator umum) dan faktor teknis (indikator khusus). Faktor umum terdiri dari Jumlah penduduk Kota Balikpapan, Luas wilayah Kota Balikpapan, Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Data collection process dilakukan berdasarkan data base masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terhitung tahun 2017 sampai dengan 2021.

1.4.3. Teknik Pengolahan Bahan dan Data Lapangan

Pengolahan bahan data berbagai peraturan perundang-undangan diawali dari identifikasi peraturan perundang-undangan yang ada kesesuaian dengan kajian evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam pengumpulan data juga dilakukan melalui Focus Group Discussion, Interview/wawancara, dan pengumpulan eviden pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Data lapangan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari responden kepada tim. Penentuan wawancara telah ditentukan dengan beberapa pihak lainnya melalui FGD

1.4.4. Teknik Analisis

Untuk menghasilkan analisis yang baik dan benar sehingga mampu mengkonstruksikan ke dalam narasi kajian, maka diperlukan kesuaian dari alat ujinya melalui teori-teori yang dipergunakan. Kemudian secara substansi dan kewenangan diuji melalui analisis peraturan perundang-undangan. Sementara kesahihan dari suatu alat uji juga ditentukan dari mengolah data empiris yang disesuaikan dengan teori-teori administrasi publik, baik teori dasar maupun teori lanjutan. Dengan demikian maka kesimpulan analisis dan evaluasi kebijakan dapat dipaparkan dengan komprehensif.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan kajian kelembagaan ini terdiri atas 5 Bab dengan rincian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini sebagai dasar dalam menyusun laporan kajian evaluasi kelembagaan ini yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, dan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat teoritis dan konsep yang ada hubungannya dengan evaluasi kelembagaan seperti Governance Theory, Institutiobnalisme Theory, Public Management Theory, New Public Management, New Public Service dan teori-teori lain yang relevan.

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN EVALUASI KELEMBAGAAN.

Analisis peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa substansi norma yang akan digunakan sebagai peraturan tertulis di daerah benar-benar ada. Keberadaan norma tentang evaluasi kelembagaan (OPD) dapat dimuat dalam peraturan di daerah. Ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dari kajian evaluasi kelembagaan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan dilakukan dua tahapan; pertama penyajian data primer dari tiga sumber data yaitu hasil assessment dari instrument pertama (PP 18 tahun 2016), instrumen kedua (Permendagdttri 99 tahun 2018) dan Permenpanrb 20 tahun 2018). Kedua analisis data masing-masing instrument dan interpretasi data menjadi kesimpulan akhir berupa rekomendasi tentang tipeologi dinas dan tingkat kematangan organisasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari semua bab yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

2.1. Governance Theory

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kat “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah (Dwiyanto,2015).

Kemudian Leach dan Percy Smith seperti yang dikutip oleh Hetifah (2009), mengemukakan perbedaan antara *government* dan *governance*. bahwa *government* mengandung pengertian politisi dan pemerintah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif. Sementara *governance* meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian *government*.

Chema seperti yang dikutip oleh Keban (2008), mengatakan bahwa *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta

2.2. Institutionalism Theory

Teori Institusional (*Institusional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung (Ridha dan Basuki, 2012).

Teori Institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015)

2.3. Public Management Theory

Menurut Nor (2014) manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya bahwa manajemen publik bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, menurut Shafritz dan Russel seperti yang dikutip oleh Keban (2008), manajemen publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya menurut Overman seperti yang dikutip oleh Keban (2004) Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain

2.4. New Public Management Theory

Pada dasarnya para teoretis mengembangkan Model *NPM (New Public Management)*, sebagai upaya mengatasi keresahan akan berbagai persoalan yang dihadapi dalam birokrasi yang cenderung buruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan antara lain oleh pola kerja yang masih tradisional, telah usang sehingga tidak mampu mengakomodir perubahan lingkungan yang begitu cepat. Model *NPM* menawarkan suatu pendekatan manajerial yang adaptif terhadap berbagai perubahan sehingga berbagai pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhi sesuai harapan (Hartati, 2020).

Menurut Bovaird dan Loffer (2003:17) *New Public Management* adalah sebuah gerakan perampangan sektor publik dan membuatnya lebih komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektifitas (*value for money*), fleksibilitas pilihan, dan transparansi. Implementasi konsep *NPM* dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma *New Public Management* merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global. Konsep *NPM* begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia

2.5. New Public Service Theory

New Public Service dalam hal ini menjamin hak masyarakat untuk dapat mengakses berbagai jenis pelayanan dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Denhardt & Denhardt (2003) berkaitan dengan *New Public Service* menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan

kepentingan warga masyarakat. “Citizens First” harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN EVALUASI KELEMBAGAAN

3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 1 (ayat 1) dikatakan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian pasal 2 mengatakan bahwa pembentukan perangkat daerah didasarkan pada: (a) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (b) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; (c). efisiensi; d. efektivitas; (e). pembagian habis tugas; (f). rentang kendali; (g). tata kerja yang jelas; dan (h). fleksibilitas.

Selanjutnya pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda. Jenis perangkat daerah terdiri atas: pertama, perangkat daerah provinsi terdiri atas: (a). sekretariat Daerah; (b). sekretariat DPRD; (c). inspektorat; (d). dinas; dan (e). badan (pasal 5 ayat 1). Ke dua, Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (a). sekretariat Daerah; (b). sekretariat DPRD; (c). inspektorat; (d). dinas; (e). badan; dan (f). kecamatan.

Kriteria tipologi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: (a). umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan (b). teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator: (a). jumlah penduduk; (b). luas wilayah; dan (c). jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 2018, tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 2018, tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah mengatakan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern. Dan yang dimaksud dengan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan penataan perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi, sementara itu untuk pembinaan penataan perangkat daerah tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembinaan penataan tersebut dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran. Pembinaan dan pembinaan perangkat daerah meliputi: (a). struktur organisasi; (b). budaya organisasi; dan (c). inovasi organisasi. Kemudian, pembinaan penataan perangkat daerah tersebut meliputi: (a). fasilitasi; (b). konsultasi; (c). penilaian; dan (d). penghargaan

3.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerinta

Di dalam peraturan ini dikatakan bahwa Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien. Setiap Lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan paling singkat tiga tahun sekali.

Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara bertahap. Evaluasi yang dilakukan tersebut meliputi: persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri, dan Menteri akan melakukan verifikasi hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Instrumen 1

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan dengan mengacu pada tiga instrumen dengan dasar tiga peraturan Perundang-Undangan. Instrumen 1 mengacu pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan terkait dengan pembentukan, jenis dan kriteria tipologi perangkat daerah. Namun demikian dalam melakukan evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, PP No 18 Tahun 2016 tidak dapat berdiri sendiri. Peraturan Perundang-Undangan ini harus ditopang oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2018.

Mengacu pada PP No 18 Tahun 2016, maka untuk menentukan kriteria tipologi organisasi perangkat daerah diperlukan beberapa tahapan kegiatan antara lain memahami konsep perangkat daerah, mengenali jenis perangkat daerah, asas pembentukan OPD, menentukan indikator penilaian, cross check data eviden dan lain sebagainya. Oleh karena itu langkah pertama adalah mengenali perangkat daerah kabupaten kota. Mengacu pada pasal 5 ayat 2 PP 18 tahun 2016 disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten kota terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Mengacu pada pasal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan memiliki 33 OPD yang akan dilakukan evaluasi. Berikut ini rincian nama-nama OPD dimaksud:

Tabel 1
Daftar OPD Pemerintah Kota Balikpapan

No	Nama OPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Dinas Pekerjaan Umum
- 4 Dinas Perumahan dan Permukiman
- 5 Satuan Polisi Pamong Praja
- 6 Dinas Sosial
- 7 Dinas Ketenagakerjaan
- 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)
- 9 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 10 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
- 11 Dinas Lingkungan Hidup
- 12 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
- 13 Dinas Perhubungan
- 14 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perindustrian
- 16 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 18 Dinas pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
- 19 Dinas Perpustakaan Dan Arsip
- 20 Dinas Perdagangan
- 21 Sekretariat Daerah
- 22 Sekretariat Dewan
- 23 Inspektorat
- 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- 25 Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)
- 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
- 27 Kecamatan Balikpapan Barat
- 28 Kecamatan Balikpapan Selatan
- 29 Kecamatan Balikpapan Kota
- 30 Kecamatan Balikpapan Utara
- 31 Kecamatan Balikpapan Timur

32 Kecamatan Balikpapan Tengah

33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Balikpapan

Secara teknis penentuan kriteria tipologi melalui lima tahapan sebagai berikut:

Gambar 3
Tahapan Penentuan Kriteria Tipologi Organisasi Perangkat Daerah



Sumber: Diolah Tim Peneliti 2022

Untuk variabel umum berlaku sama untuk semua organisasi perangkat daerah, terdiri dari tiga indikator antara lain jumlah penduduk; luas wilayah; jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wilayah Pemerintah Kota Balikpapan skor atau nilai variabel umum sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Penilaian Faktor Umum

No	Indikator	Skor/Nilai
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50
Jumlah		170

Sumber: PP No 18 Tahun 2016

Sedangkan kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Secara detail instrument 1 terlampir dalam laporan

ini. Dengan mengacu pada tahapan penilaian diatas, berikut ini adalah hasil penilaian pada masing-masing organisasi perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1. Urusan Pendidikan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	200	
2	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar	360	
3	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan PD	120	
			680
Jumlah A + B			850
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$850 \times 1,1$		935
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B: 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
2. Urusan Kebudayaan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam kab kota	100	
2	Jumlah kesenian yg terdapat dalam satu kabupaten kota	300	
3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota dan masyarakat	20	

4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten- kota	180	
			600
			770
Jumlah A + B			
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	770 x 1,1		847
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	Urusan Pendidikan		935
2	Urusan Kebudayaan		847
Jumlah			1782
Tipologi			A

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas pendidikan dan kebudayaan mengampu dua urusan, pertama urusan Pendidikan dan kedua urusan kebudayaan. Urusan Pendidikan memiliki rentang nilai 935 dengan kriteria tipologi A. Tingginya akumulasi nilai tersebut disupport oleh faktor tingginya jumlah satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar serta jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini. Mengacu pada instrumen penilaian bahwa ketiga indikator tersebut berada pada posisi tertinggi kedua dari interval penilaian. Sehingga pada urusan Pendidikan ini Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pada posisi baik. Eviden yang terdata bahwa untuk jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terbagi dalam PAUD (485), PNF (22), SD (190), SMP (75), total satuan Pendidikan di Kota Balikpapan 772. Jika diperlukan dapat disusun persentase secara sistematis untuk menentukan angka ideal dari masing-masing jenjang satuan Pendidikan. Sedangkan jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar di Kota Balikpapan sebesar 104.157 yang terbia dalam PAUD: 10.310, SD: 63.933 dan SMP: 29.914. Kegiatan satuan Pendidikan di Balikpapan ditopang jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sebanyak 11 kurikulum.

Urusan kebudayaan yang merupakan urusan kedua di Dinas Pendidikan Balikpapan secara akumulasi nilai pada kriteria tipeologi maksimal yaitu A. Dari empat indikator teknis, terdapat dua indikator yang mendapatkan nilai maksimal yaitu jumlah suku bangsa yang terdapat dalam kabupaten kota dan jumlah kesenian yg terdapat dalam satu kabupaten kota. Sementara indikator jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten- kota pada level menengah artinya cukup. Namun untuk indikator jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota dan masyarakat pada posisi paling rendah. Sehingga Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memiliki pekerjaan rumah cukup berat untuk menaikkan indikator tersebut. Untuk urusan kebudayaan, pemerintah kota Balikpapan perlu mengembangkan kajian-kajian budaya yang bersumber dari museum. Sementara saat ini Museum yang ada hanya satu. Rencana dan program yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan lokasi yang dapat dibuat untuk museum sebagai pusat pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Jumlah minimal museum yang harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten kota paling tidak 4 sd 5 museum. Dengan jumlah tersebut maka penilaian dengan indikator ini akan mencapai pada tataran medium.

Mengacu pada paparan kedua urusan tersebut, organisasi perangkat perangkat daerah ini memiliki kesempatan untuk memiliki satu sekretariat yang terdiri dari empat bidang. Kemudian Sekretariat tersebut terdiri dari 3 subbagian. Dan empat bidang diatas terdiri dari masing-masing tiga seksi. Dengan memaksimalkan struktur organisasi tersebut diharapkan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan akan dapat meningkatkan interval nilai untuk urusan kebudayaan terutama pada indikator ketiga yaitu jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota.

2. Dinas Kesehatan

Tabel 4
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan			
Urusan/Bidang Kesehatan			
A	Faktor Umum		

1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor Teknis		
1	Jumlah Penduduk	560	
2	Jumlah kepadatan penduduk	20	
		580	580
Jumlah A + B			750
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$750 \times 1,1$		825
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas kesehatan termasuk urusan konkuren pemerintah daerah, karena menyangkut pelayanan dasar pada masyarakat. Sehingga keberadaan perangkat daerah ini pada posisi sangat urgen. Namun demikian ukuran penilaian untuk perangkat ini cukup sederhana, karena untuk faktor teknis hanya terdiri dari dua indikator; jumlah penduduk dan jumlah kepadatan penduduk. Dari kedua indikator tersebut indikator kedua pada posisi interval paling rendah yaitu pada poin 20. Sehingga secara demografis wilayah Balikpapan masih pada tataran kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian maka OPD ini pada hakekatnya memiliki kesempatan yang cukup besar untuk dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal, mengingat interval kepadatan pendudukan pada posisi paling rendah. Data menunjukkan bahwa Balikpapan memiliki jumlah penduduk 710.293 dengan tingkat kepadatan penduduk 1.831 km². Tingkat kepadatan pendudukan Kota Balikpapan adalah peringkat kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda. Apabila hal ini dikomparasi dengan 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memiliki beban kerja yang cukup berat.

Dengan mengacu pada data tabel diatas maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada kriteria Tipologi A maka secara kelembagaan organisasi perangkat daerah ini dapat membawahi 1 (satu) sekretariat dengan jumlah paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3

(tiga) subbagian. Dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dengan struktur organisasi yang cukup dan maksimal maka dapat memberikan dampak kepada pemaksimalan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi konkuren terutama fungsi wajib dalam memberikan pelayanan dibidang Kesehatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 5
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016);
Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
	Bidang Perumahan		
1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kab/kota	20	
2	Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota	60	
3	Jumlah kapasitas tampungan air yang dikelola kab/kota	20	
4	Panjang garis pantai wilayah sungai kewenangan kab/kota	6	
5	Total luas daerah irigasi	4	
6	Jumlah desa/kel yang rawan air	10	
7	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah	4	
8	Luas cakupan layanan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	6	
9	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai	30	
10	Jumlah luas kawasan permukiman	4	
11	Panjang jalan yang menjadi kewenangan kab/kota	300	
12	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi	0	
13	Jumlah rata-rata pengajuan IMB per tahun	6	
14	Luas ruang terbuka hijau	30	
15	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan	20	
16	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	6	
17	Persentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	30	
18	Luas kawasan budidaya	8	
			564
Jumlah A + B			734
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	734 x 1,1		807,4
D.	Kesimpulan		A
	Skor		

	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas pekerjaan umum merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapatkan tugas pada urusan konkuren pemerintah. Sehingga perangkat daerah ini mendapatkan hak cukup istimewa mengingat pentingnya urusan yang harus dikelolanya. Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Namun ketentuan ini terkait dengan pasal berikutnya.

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut maka perangkat daerah ini belum dapat dimekarkan dalam dua perangkat daerah mengingat nilai yang didapat masih dibawah 951. Catatan penting untuk perangkat daerah ini adalah masih banyak indikator yang belum memiliki data base yang baik, artinya nilainya masih minim bahkan pada tataran nol. Indikator tersebut antara lain panjang garis pantai wilayah sungai kewenangan kab/kota, total luas daerah irigasi, jumlah fasilitas pengelolaan air limbah, luas cakupan layanan sistem pengelolaan air limbah (spal), jumlah luas kawasan permukiman, jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi, jumlah rata-rata pengajuan imb per tahun, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan luas kawasan budidaya. Tahun 2023 merupakan tahun pertama kesempatan bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk dapat memperbaiki indikator-indikator yang belum maksimal nilainya. Dengan mengacu pada ketentuan pasal diatas, jika nilai OPD terkait mencapai 951 maka memungkinkan untuk dikembangkan menjadi opd yang yang baru.

3. Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 6
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman			
Urusan/Bidang Perumahan dan Permukiman			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
	Bidang Perumahan		
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	50	
2	Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG	50	
3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing dibawah 10 ha	40	
4	Jumlah total luas perumahan (ha)	78	
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman	4	
6	Indeks 10 risiko bencana kabupaten/kota	40	
7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah	50	
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi	50	
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten kota	20	
			382
Jumlah A + B			
			552
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	552 x 1,1		607,2
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Perumahan dan permukiman termasuk urusan yang terkait dengan pelayanan dasar untuk masyarakat. Sehingga urusan ini masuk dalam urusan konkuren dalam kategori urusan wajib. Sehingga urusan yang dikelola Dinas Perumahan dan permukiman sama pentingnya dengan

OPD yang mengurus masalah Kesehatan dan Pendidikan serta pekerjaan umum. Untuk memberikan penilaian kepada Dinas Perumahan dan permukiman diperlukan cross check data yang cukup banyak, karena OPD ini dinilai dengan berdasarkan pada 3 faktor umum dan 9 faktor teknis.

Berdasarkan data kuantitatif pada tabel diatas, Dinas Perumahan dan permukiman mendapatkan kriteria tieplogi B. Namun meskipun masuk dalam kategori B, nilai yang diperoleh masih cukup rendah. Sehingga untuk Dinas Perumahan dan permukiman perlu untuk memberikan perhatian khusus pada indikator-indikator teknis berikut ini:

- Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing dibawah 10 ha
- Jumlah total luas perumahan (ha)
- Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman
- Jumlah jenis potensi bencana kabupaten kota

Beberapa indikator di atas sebaiknya menjadi perhatian utama bagi Dinas Perumahan dan permukiman. Misalnya indikator luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing dibawah 10 ha. Pengelolaan wilayah kumuh (slum area) merupakan salah satu indikator keberhasilan Dinas Permukiman dalam pengelolaan wilayah di daerah. Sehingga diperlukan upaya dan dukungan anggaran yang cukup untuk meminimalisir luasnya wilayah kumuh. Jika wilayah kumuh di Balikpapan dapat diminimalisir menjadi kurang dari 100 ha, hal ini akan menjadi kontribusi bagi daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun demikian OPD dalam kategori kinerja yang cukup baik yang dibuktikan dengan nilai evaluasi yang ada.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 7
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja			
1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		

1	Jumlah peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana maupun administrasi	120	
2	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku	50	
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP Berdasarkan jadwal rutin	90	
4	Jumlah aset statis pemerintah kab/kota yang menjadi sasaran pengamanan	150	
5	Jumlah rata-rata pertahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	150	
			560
Jumlah A + B			730
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$730 \times 1,1$		803
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B: 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
2. Urusan Kebakaran			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah petugas pemadam kebakaran	300	
2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran	120	
3	Jumlah anggota Linmas	0	
			420
Jumlah A + B			590
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$590 \times 1,1$		649
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		803
2	Urusan Kebakaran		649
Jumlah			1452
Tipologi			A

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki dua urusan, pertama urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kedua urusan kebakaran yang merupakan pelimpahan urusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, evaluasi didasarkan pada jumlah peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana maupun administrasi, jumlah peraturan bupati/walikota yang masih berlaku, jumlah wilayah sasaran patroli polisi pp berdasarkan jadwal rutin, jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan, jumlah rata-rata pertahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator ini tentu untuk mengukur bagaimana kinerja dan beban kerja perangkat daerah. Akumulasi nilai untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah 803 dengan kriteria tipologi A.

Interpretasi dilakukan pada masing-masing indikator, dari keempat indikator terdapat indikator yang telah mencapai hasil maksimal yaitu indikator 2, 4 dan 5 dengan fokus peraturan bupati/walikota (248), aset statis, (5.203) dan kegiatan kepala daerah (2.136 masing-masing pada nilai interval paling tinggi. Ketiga indikator ini menunjukkan tingginya mobilitas Satpol PP dalam menjalankan tugas ditiga indikator tersebut. Namun demikian disisi lain terdapat dua indikator yang memiliki nilai menengah dan paling rendah yaitu Jumlah peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana maupun administrasi, skor 120 dengan basis data 21 Perda, nilai ini pada interval kedua dari bawah. Sehingga dengan nilai ini Satpol PP harus bekerja lebih baik untuk memperbaiki data base terkait dengan Perda di Kota Balikpapan. Sedangkan untuk indikator jumlah wilayah sasaran patroli Polisi PP Berdasarkan jadwal rutin mendapat skor 90 dengan basis data 39.920. Dengan dasar data tersebut urusan

Rendahnya indikator wilayah sasaran patroli Polisi PP diprediksikan terkait dengan kelengkapan atau ketersediaan sarana prasarana dan anggaran operasional. Oleh karena itu pada poin ini perlu di cross check kondisi riil di lapangan. Kalau memang faktornya adalah kurangnya dukungan anggaran dan

sarana operasional, maka OPD disarankan melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar masalah ini dapat dicarikan solusi.

Pembahasan kedua pada urusan kebakaran. Pada hakikatnya urusan kebakaran merupakan urusan yang masuk dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah, namun demerger dalam Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun dari proses penggabungan, namun untuk penghitungan nilai tetap digunakan rumus yang sama yaitu didasarkan data pada faktor umum dan faktor teknis. Untuk faktor teknis mengacu pada tiga indikator: jumlah petugas pemadam kebakaran, jumlah wilayah manajemen kebakaran, jumlah anggota linmas. Urusan kebakaran memiliki data base pada indikator satu dan dua, sementara indikator ketiga tidak memiliki data. Indikator satu dengan data base 296 masuk dalam interval paling tinggi dengan skor 300, sementara indikator kedua dengan data base 6 dengan skor 120 masuk dalam interval nomor dua dari bawah, sementara indikator ketiga tidak memiliki data. Dengan mengacu pada data dua indikator tersebut urusan kebakaran masuk dalam kriteria tipologi B. Yang menjadi catatan penting dalam urusan kebakaran adalah tidak adanya data pada indikator ketiga yaitu jumlah anggota linmas. Sehingga dengan tidak adanya data pada indikator ketiga berpengaruh pada jumlah skor pada urusan kebakaran.

Kesimpulan untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah adanya perbedaan level interval penilaian pada kedua urusan, namun secara terpisah masing-masing urusan memiliki strengths and weaknesses yang terletak pada masing-masing indikator. Mengacu pada data kedua urusan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam kriteria Tipologi A. Dengan demikian maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berkewajiban membentuk 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

5. Dinas Sosial

Tabel 8
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Sosial

Dinas Sosial			
Urusan/Bidang Sosial			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170

B	Faktor teknis		
1	Jumlah PMKS termasuk anak yang berhadapan dengan hukum	500	
2	Jumlah fakir miskin	90	
3	Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil	6	
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial	96	
			692
Jumlah A + B			862
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	486 x 1,1		948,2
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas sosial diberikan beban kerja satu urusan yaitu urusan sosial, dimana untuk melakukan evaluasi ditentukan dengan dua faktor yaitu faktor umum dan faktor teknis. Faktor teknik difokuskan pada empat poin penting; jumlah PMKS termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah fakir miskin, Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil, Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial. Pastinya keempat indikator ini menjadi tolak ukur dinamika beban kerja di Dinas Sosial. Secara kuantitatif angka atau nilai untuk OPD ini sangat bagus yaitu 948,2 dengan kriteria tipologi A. Dinas sosial memiliki responsibilitas terhadap masalah-masalah sosial daerah. Tinggi rendahnya angka-angka menyangkut masalah sosial tentu menjadi indikator keberhasilan OPD dalam menjalankan program kerjanya. Mengacu pada tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa angka PMKS dan jumlah fakir miskin di Balikpapan cukup tinggi sehingga menjadi beban kerja yang cukup tinggi. Kota Balikpapan dengan jumlah penduduk 710.293 memiliki angka PMKS 339.989 dan jumlah angka fakir miskin 320.972. Jika mengacu pada data tersebut maka angka kemiskinan dan angka PMKS kota Balikpapan sangat tinggi. Dengan demikian maka kedua masalah ini menjadi prioritas untuk dicarikan pemecahannya, dengan menyiapkan anggaran yang cukup dari sumber-sumber yang memungkinkan.

Dengan menggunakan dasar data hasil evaluasi kelembagaan tersebut maka Dinas Sosial Kota Balikpapan dapat mengembangkan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.

6. Dinas Ketenagakerjaan

Tabel 9
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan			
Urusan/Bidang Tenaga Kerja			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah angkatan kerja Usia 15 tahun keatas	400	
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil	180	
			580
Jumlah A + B			750
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$750 \times 1,1$		825
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	Setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Ketenagakerjaan membawahi satu urusan yaitu urusan tenaga kerja, yang diukur melalui dua faktor yaitu umum dan teknis. Faktor teknis menggunakan dua indikator yaitu jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas dan jumlah perusahaan mikro/kecil. Nilai akumulasi dari hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan nilai maksimal yaitu kriteria tipologi A. Dengan demikian ketentuan yang berlaku OPD yang lain juga berlaku untuk Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan memiliki

urusan pokok yaitu manage tenaga kerja, dan secara organisasi urusan tenaga kerja masuk dalam kategori urusan konkuren pemerintahan dalam kategori wajib diluar urusan pelayanan dasar kepada warga masyarakat. Sehingga secara struktur tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa urusan tenaga terkait dengan pelayanan dasar kepada warga masyarakat.

Mengacu data eviden, pada indikator pertama, jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas berjumlah 502.831. Angka tersebut masuk dalam interval keempat dengan skala nilai $800 \times 50\% = 400$. Sedangkan indikator kedua jumlah perusahaan mikro/kecil, berdasarkan data eviden berjumlah 47.054, angka ini masuk dalam interval keempat dengan skala nilai $600 \times 30\% = 180$. Dengan penjelasan melalui angka-angka tersebut, maka Dinas ketenagakerjaan berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai OPD dengan kriteria tipologi A, ketentuan hanya terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)

Tabel 10
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
(DP3AKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)			
1. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk kota bpn	80	
2	Luas wilayah kota bpn	40	
3	Jumlah APBD	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Indeks pembangunan gender 89,65	250	
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak 48	160	
3	Jumlah penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 95	150	
4	Rasio perempuan korban kekerasan 24,5	100	
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus 2,6	20	
			680
Jumlah A + B			850

C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	850 x 1,1		935
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk kota bpn	80	
2	Luas wilayah kota bpn	40	
3	Jumlah APBD	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah desa 34	100	
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES 0	10	
3	Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan 7	4	
4	Jumlah kerjasama antar desa dalam satu kabupaten/kota 0	6	
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten /kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa 3.576	200	
			324
Jumlah A + B			494
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	494 x 1,1		2017,4
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
3. Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk kota bpn	80	
2	Luas wilayah kota bpn	40	
3	Jumlah APBD	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah pasangan usia subur 95.265	90	
2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan 25 pkb	24	

3	Jumlah organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan KB 1	24	
4	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS 262	40	
5	Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa 60	80	
6	Jumlah organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan keluarga KB 1	18	
7	Jumlah keluarga 158.464	48	
			324
	Jumlah A + B		494
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	494 x 1,1		543,4
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak		935,0
2	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		576,4
3	Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		543,4
	Jumlah		2.054,8
	Tipologi		A

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

DP3AKB merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang membidangi tiga urusan. Dengan banyaknya urusan yang menjadi tanggungjawab DP3AK maka hal ini menjadi catatan khusus dalam penilaian evaluasi kelembagaan. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dinilai melalui lima indikator teknis yaitu, Indeks pembangunan gender kabupaten /kota: (89,65_250), Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten /kota: 48_160, Rasio perempuan korban kekerasan: (24,5_100_Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan:(95_150), Rasio anak yang memerlukan perlindungan: (2,6_20).

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dinilai dengan lima indikator; Jumlah desa/kelurahan (34_100), Jumlah Badan Usaha Milik Desa/BUMDES (0_10), Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan (7_4), Jumlah kerjasama

antar desa dalam satu kabupaten/kota (0_6), Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten /kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa (3.576_200).

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dinilai dengan 7 indikator antara lain Jumlah pasangan usia subur (95.265_90), Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB: 2 Desa/1 Kelurahan (25_24), Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB (1_24), Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS (262_40), Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (60_80), Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten /kota dalam ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (1_18), dan Jumlah keluarga (158.464_48).

Mengacu pada nilai pada masing-masing urusan, maka urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan atau bidang yang mendapatkan penilaian paling tinggi. Sehingga mengacu pada PP 18 tahun 2016, urusan ini layak untuk berdiri sendiri menjadi organisasi perangkat daerah. Namun demikian jika kebijakan pimpinan daerah tetap menggabungkan ketiga urusan tersebut menjadi satu bidang maka DP3AKB memiliki total nilai 2.054,8 dengan kriteria tipologi A. Dengan dasar tipologi A, maka perangkat daerah ini dapat memaksimalkan struktur organisasinya dengan rincian terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

8. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tabel 11

**Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**

Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan			
1. Urusan/Bidang Pangan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	

2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
	Bidang Pangan		
1	Jumlah cadangan pangan	80	
2	Jumlah Desa/kelurahan	20	
3	Persentase penduduk rawan pangan	300	
			400
Jumlah A + B			570
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	570 x 1,1		627,00
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
Bidang kelautan dan perikanan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
	Bidang kelautan dan perikanan		
1	Jumlah nelayan kecil	40	
2	Jumlah tempat pelelangan ikan	30	
3	Jumlah SIUP di bidang pembudidayaan ikan	0	
4	Luas lahan potensi budidaya ikan	200	
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan	30	
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT	50	
			350
Jumlah A + B			520
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	520 x 1,1		572
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Bidang pertanian			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian	16	
2	Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal	6	
3	Jumlah pakan yang beredar	40	
4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar	30	
5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak	24	
6	Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi	24	
7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan)	16	
8	Jumlah rata-rata perbulan keterangan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten kota	30	
9	Jumlah rata-rata perbulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten	30	
10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten kota	24	
11	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten kota	6	
12	Jumlah peternak	36	
13	Luas lahan pertanian di kabupaten kota	32	
14	Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten kota	20	
15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0	
16	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan	0	
			334
Jumlah A + B			504
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	504 x 1,1		554,00
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	Urusan/Bidang Pangan		627
2	Bidang kelautan dan perikanan		572

3	Bidang pertanian	554
Jumlah		1753
Tipologi		A

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapatkan tugas pada urusan konkuren pemerintah. Sehingga perangkat daerah ini mendapatkan hak cukup istimewa mengingat pentingnya urusan yang harus dikelola. Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Namun ketentuan ini terkait dengan pasal berikutnya.

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan merupakan OPD dalam kategori urusan pemerintah wajib namun dalam kategori OPD yang tidak memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Struktur organisasi OPD ini terdiri dari tiga urusan yaitu:

1. Urusan/bidang Pangan
2. Urusan/bidang kelautan dan perikanan
3. Urusan/bidang pertanian

Ketiga urusan tersebut masing-masing disupport oleh dua faktor yaitu faktor umum dan faktor teknis. Urusan atau bidang pangan memiliki tiga indikator teknis yaitu jumlah cadangan pangan, jumlah desa/kelurahan dan persentase penduduk rawan pangan. Indikator 1 dengan data eviden 20,8 ton masuk dalam interval satu dengan poin 80. Indikator kedua dengan data eviden 34 kelurahan masuk dalam interval 1 dengan nilai 20, dan indikator ketiga dengan data base dari eviden >15% masuk dalam interval 5 dengan nilai 300. Data pada indikator tersebut sebagai bukti kondisi riil masalah pangan di Kota Balikpapan. Cadangan

pangan pada posisi paling rendah, artinya diperlukan upaya dan terobosan untuk meningkatkan cadangan pangan kedepan. Hal ini untukantisipasi kalau terjadi bencana yang berkepanjangan maka Kota Balikpapan memiliki kecukupan cadangan pangan. Berdasarkan interpretasi peneliti untuk indikator kedua bersifat relatif karena mengacu pada jumlah desa atau kelurahan. Sehingga nilai pada nilai pada indikator ini tergantung jumlah desa atau kelurahan daerah setempat. Nilai atau skor dapat ditingkatkan jika ada pemekaran desa atau kelurahan. Sedangkan indikator ketiga menyangkut masalah persentase penduduk rawan pangan. Di wilayah Balikpapan jumlah penduduk rawan pangan cukup tinggi, mencapai 8,82 % (prioritas 2) dan 38,23% (prioritas 3), artinya masuk dalam interval 3 (>15%). Tingginya angka penduduk rawan pangan dan rendahnya cadangan pangan di kota Balikpapan tentu menjadi beban berat daerah. Dinas DPPP dalam urusan pangan seyogyanya menjadikan masalah ini sebagai prioritas untuk dicarikan pemecahannya. Urusan atau bidang pangan diidentifikasi dalam kriteria tipologi B dengan total nilai 627.

Urusan/bidang kelautan dan perikanan, faktor teknis terdiri dari 6 indikator; jumlah nelayan kecil: 635 masuk dalam interval satu dengan nilai 40, jumlah tempat pelelangan ikan: 2 diklasifikasi dalam interval 1 dengan nilai 30, sedangkan untuk jumlah siup di bidang pembudidayaan ikan nilai nol karena urusan atau bidang kelautan dan perikanan tidak memiliki data. Indikator keempat, luas lahan potensi budidaya ikan: 510.695 masuk dalam interval maksimal (5) dengan poin 200. Indikator kelima, jumlah rumah tangga pembudidaya ikan: 108 RTP masuk dalam interval 1 dengan nilai 30 dan indikator ke enam, jumlah kapal sampai dengan 5 GT: 585 masuk dalam interval maksimal (5) dengan nilai 50. Dengan mengacu data kuantitatif diatas maka yang menjadi problem adalah indikator pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Keempat indikator tersebut pada level paling rendah. Kota Balikpapan merupakan wilayah yang memiliki garis pantai cukup Panjang, sehingga kondisi geografis ini menjadi potensi untuk mengembangkan profesi perikanan. Pemberdayaan dalam bidang perikanan dan kelautan cukup potensial untuk dapat

dimaksimalkan, sehingga program-program yang mendorong peningkatan kuantitas nelayan kecil cukup dimungkinkan. Terkait dengan tempat pelelangan ikan, ada lima interval pilihan dengan range angka <10, 11-20, 21-30, 31-40, >40. Pemerintah Kota Balikpapan yang memiliki garis pantai cukup Panjang hanya memiliki 2 tempat pelelangan ikan. Dengan konsiderasi potensi tersebut maka DPPP Kota Balikpapan dapat menjadikan indikator kedua ini menjadi salah satu program prioritas tahun 2023. Kondisi ini memiliki korelasi dengan indikator ketiga yaitu jumlah SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan indikator kelima yaitu jumlah rumah tangga pembudidaya ikan. Sehingga program-program pemberdayaan di bidang ini khususnya membuka kesempatan yang mempermudah perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan akan berdampak positif pada peningkatan angka-akang pada indikator 1, 2, 3 dan 5. Rendahnya nilai pada keempat indikator tersebut berdampak pada hasil evaluasi kelembagaan OPD. Total nilai urusan bidang perikanan dan kelautan 572 dengan kriteria tipeologi C.

Urusan atau bidang pertanian diukur dengan faktor teknis yang terdiri dari 16 indikator. Dari indikator-indikator tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok (tinggi, sedang dan rendah).

Indikator dengan kategori rendah (43,75%) antara lain:

1. Jumlah pengecer/kios sarana pertanian
2. Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal
3. Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi
4. Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan)
5. Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten kota
6. Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
7. Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan

Indikator dengan kategori sedang (12,50%) antara lain:

1. Jumlah peternak
2. Luas lahan pertanian di kabupaten kota

Indikator dengan kategori tinggi (43,75%) antara lain:

1. Jumlah pakan yang beredar
2. Jenis sediaan obat hewan yang beredar
3. Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak

4. Jumlah rata-rata perbulan keterangan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten kota
5. Jumlah rata-rata perbulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten
6. Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten kota
7. Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten kota

Dengan mengamati komparasi persentase antara rendah, sedang dan tinggi (43,75-12,50-43,75), maka yang menjadi pertanyaan besar adalah tingginya indikator dengan kategori rendah (43,75%). Secara keseluruhan maka data ini akan berdampak kuat dalam menentukan hasil evaluasi kelembagaan dan juga akan berdampak pada penghitungan akumulasi dari tiga urusan dalam OPD DP3. Dengan demikian maka urusan pertanian dapat dikonsentrasikan pada indikator dengan kategori rendah. Misalnya mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro di bidang pertanian. Pengembangan ternak lokal juga merupakan pilihan yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, dengan bekerjasama dengan pengusaha ternak dari daerah lain yang mampu memberikan motivasi dan bimbingan usaha ternak mengingat kebutuhan daging Kalimantan Timur yang terus bertambah. Penambahan luas lahan pertanian yang dialiri irigasi adalah salah satu langkah yang logis untuk dapat meningkatkan swasembada pangan, meningkatkan cadangan pangan, dan memaksimalkan hasil bidang pertanian. Untuk dapat mendorong majunya bidang pertanian maka perlu dipermudah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kedua fokus usaha tersebut dapat meningkatkan dan menumbuhkan iklim usaha dan memberikan kontribusi pada kemajuan bidang pertanian.

Berdasarkan data pada tabel diatas, urusan atau bidang pertanian mendapatkan nilai 554 dengan kriteria tipologi C. Kesimpulan untuk OPD DP3 dengan penggabungan nilai dari ketiga urusan, maka termasuk dalam kriteria tipologi A. Dengan demikian maka OPD ini berkewajiban untuk memaksimalkan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4

(empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

10. Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang

Tabel 12
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Dinas
Pertanahan Dan Penataan Ruang

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang			
Urusan Pertanahan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun (5 th terakhir)	350	
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum	250	
3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota	40	
			640
Jumlah A + B			810
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	530 x 1,1		891
D.	Kesimpulan	A	
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Urusan Pertanahan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum memiliki keterkaitan. Historis ini menjadi konsiderasi dalam memberikan interpretasi evaluasi kelembagaan. Sehingga dasar perundang-undangan yang dipakai adalah PP 18 Tahun 2016. Urusan Pertanahan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum salah satu perangkat daerah yang mendapatkan tugas pada urusan konkuren pemerintah. Sehingga perangkat daerah ini mendapatkan hak cukup istimewa mengingat pentingnya urusan yang harus dikelolanya. Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan

Urusan Pertanahan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pertanahan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

Dengan mengacu pada perhitungan tabel diatas OPD Pertanahan dan tata ruang mendapatkan skor atau nilai 891 dengan kriteria tipologi A. Dengan demikian maka OPD ini berkewajiban untuk memaksimalkan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi

11. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 13
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016), Dinas
Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup			
1. Urusan/Bidang Lingkungan Hidup			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3	150	
2	jumlah TPS	150	
3	Jumlah bank sampah	150	
4	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL)	200	
5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan	150	
			800
Jumlah A + B			970
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	970 x 1,1		1.067
D.	Kesimpulan		A

	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
2. Urusan/Bidang Kehutanan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Luas Tahura dalam kabupaten/kota	60	
2	Jumlah jenis tanaman dan satwa	250	
3	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan	50	
			360
Jumlah A + B			530
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$530 \times 1,1$		583
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	Bidang Lingkungan Hidup		1.067
2	Bidang Kehutanan		583
Jumlah			1.650
Tipeologi			A

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas lingkungan hidup terdiri dari dua urusan; Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan, kedua urusan tersebut dievaluasi dengan menggunakan dasar atau faktor umum dan faktor teknis. Urusan lingkungan hidup, terkait dengan faktor teknis, diukur dengan lima indikator antara lain jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3, jumlah TPS, jumlah bank sampah, jumlah dokumen lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL); jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan. Dari kelima indikator tersebut,

berdasarkan input data dan eviden, urusan lingkungan hidup mendapatkan nilai maksimal, yaitu pada interval paling tinggi (lima). Jumlah nilainya 1.067, termasuk dalam kategori atau kriteria tipologi A.

Sedangkan urusan kehutanan terkait dengan faktor teknis terdiri dari tiga indikator; luas tahura dalam kabupaten/kota, jumlah jenis tanaman dan satwa, jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan. Urusan kehutanan pada dasarnya sulit untuk mendapatkan nilai A, karena unsur penilaiannya sangat terbatas. Sehingga untuk wilayah kota, unsur kehutanan secara umum pada pda tataran C atau B. Hal ini juga terjadi di Kota Balikpapan, dari tiga indikator faktor teknis hanya indikator kedua yang mendapatkan skor maksimal. Total nilai urusan kehutanan dari faktor umum dan faktor teknis adalah 583 termasuk dalam kriteria tipologi C.

Penggabungan nilai urusan lingkungan hidup (1.067_A) dan urusan kehutanan (583_C) maka OPD Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam kriteria tipologi A. Dengan mengacu pada hasil perhitungan tersebut, OPD ini berkewajiban untuk memaksimalkan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

12. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Tabel 14
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil			
Urusan/Bidang Kependudukan dan catatan Sipil			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah penduduk (jiwa)	350	
2	Jumlah kecamatan atau nama lain	20	
3	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain	60	
4	Jumlah rata-rata mobilitas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir	60	

5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km ²)	90	
			580
Jumlah A + B			750
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	750 x 1,1		825
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan urusan konkuren pemerintah yang masuk urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Faktor teknis terdiri dari jumlah penduduk (jiwa), jumlah kecamatan atau nama lain, jumlah kelurahan/desa atau nama lain, jumlah rata-rata mobilitas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir, tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km²). Dari kelima indikator, hanya satu yang dapat memaksimalkan proses dan hasil. Hal ini terikat dengan kebijakan pimpinan daerah dan laju perkembangan daerah. Pertama terkait dengan jumlah penduduk Kota Balikpapan (710.293). Dengan memiliki jumlah penduduk dengan angka tersebut, maka secara otomatis akan berdampak pada skor yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Jika dikaji lebih jauh, perkembangan demografi memiliki banyak faktor dan program baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dipindahkannya Ibu Kota Negara di Penajam Paser utara yang memiliki batas wilayah dengan Kota Balikpapan, tentu akan berdampak pada melonjaknya jumlah penduduk Kota Balikpapan. Indikator pertama memiliki koneksitas dengan indikator kelima yaitu tingkat kepadatan penduduk, dimana data kependudukan yang dikutip oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil berasal dari Bappeda Litbang dan BPS.

Nilai total dari faktor umum dan teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah 825 dengan kriteria tipologi A. Dengan mengacu pada

hasil perhitungan tersebut, OPD ini berkewajiban untuk memaksimalkan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi

13. Dinas Perhubungan

Tabel 15
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan			
Urusan Perhubungan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas	10	
2	Panjang jalan kabupaten kota	100	
3	Jumlah terminal C	10	
4	Jumlah lokasi perparkiran yang dikelola pemda maupun swasta	40	
5	Jumlah kendaraan bermotor	100	
6	Jumlah unit angkutan umum	100	
7	Jumlah trayek angkutan umum	10	
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau	4	
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	12	
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau	6	
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau	4	
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau	4	
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut	4	
14	Jumlah rambu jalan	150	
15	Panjang trotoar jalan	50	
			604
Jumlah A + B			774
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		

	774 x 1,1		851,4
D.	Kesimpulan		
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Perhubungan membawahi satu urusan yaitu urusan perhubungan. Urusan perhubungan diukur dengan faktor teknis yang terdiri dari 15 indikator. Dari indikator-indikator tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok (tinggi, sedang dan rendah).

Indikator dengan kategori rendah (40%) antara lain:

1. Jumlah terminal C
2. Jumlah trayek angkutan umum
3. Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau
4. Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau
5. Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau
6. Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut

Indikator dengan kategori sedang (13,3%) antara lain:

1. Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
2. Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau

Indikator dengan kategori tinggi (46,67%) antara lain:

1. Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas
2. Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas
3. Jumlah lokasi perparkiran yang dikelola pemda maupun swasta
4. Jumlah kendaraan bermotor
5. Jumlah unit angkutan umum
6. Jumlah rambu jalan
7. Panjang trotoar jalan

Dengan mengamati komparasi persentase antara rendah, sedang dan tinggi (40%-13,33%-46,67%), maka yang menjadi pertanyaan besar adalah tingginya indikator dengan kategori rendah (40%). Tingginya

persentase indikator kategori rendah tentu akan berdampak pada nilai akhir evaluasi kelembagaan. Namun demikian secara keseluruhan hasil evaluasi kelembagaan Dinas Perhubungan adalah tipologi A dengan nilai 851,4.

14. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 16
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika			
1. Urusan/Bidang Komunikasi Dan Informatika			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah Perangkat daerah, UPT, dan kelurahan/desa	138	
2	Jumlah saluran komunikasi/media	180	
3	Jumlah aparatur negara	100	
4	Jumlah saluran komunikasi/ media	84	
5	Jumlah layanan publik dan pemerintahan	150	
			652
Jumlah A + B			822
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	822 x 1,1		904,2
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	Setingkat Sub Bidang: <300		
2. Urusan/Bidang Persandian			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor Teknis		
1	Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota	32	
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi	32	
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tk Kab/Kota	32	
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yg membutuhkan dukungan	32	

5	Jumlah perangkat daerah di tk kab/kota yg gunakan persandian	32	
		160	160
Jumlah A + B			330
C	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	330 x 1,1		363
D	Kesimpulan	Setingkat Bidang	
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
3. Urusan/Bidang Statistik			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor Teknis		
1	Jumlah survei bid sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM	90	
2	Jum kompilasi produk administrasi bid, sos, ekopol, hukum, HAM	70	
			160
Jumlah A + B			330
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	330 x 1,1		363
D	Kesimpulan	Setingkat bidang	
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir	Nilai	
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	904,2	
2	Persandian	363	
3	Statistik	363	
Total		1.665,4	
Tipeologi		A	

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Komunikasi Dan Informatika memanager tiga urusan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik. Secara general Diskominfo mendapatkan hasil maksimal dalam proses evaluasi kelembagaan, dengan total nilai 1.665,4, kriteria tipologi A. Konsekuensi logisnya, Diskominfo berkewajiban untuk mengembangkan lembaga minimal melalui pengembangan struktur organisasi. Pasal yang berlaku adalah apabila dinas atau badan yang merupakan perangkat daerah termasuk dalam kriteria tipologi A, maka OPD tersebut diizinkan untuk memiliki 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Evaluasi untuk Diskominfo adalah pengembangan urusan persandian dan statistik. Faktor teknis pada urusan persandian terdiri dari lima indikator yaitu jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota, jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi, jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tk kab/kota, jumlah rata-rata kegiatan penting yg membutuhkan dukungan, jumlah perangkat daerah di tk kab/kota yg gunakan persandian. Keseluruhan indikator tersebut pada interval nilai terendah dengan nilai 32. Hal ini juga terjadi pada urusan statistik. Faktor teknis urusan statistik terdiri dari jumlah survei bid sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dan jumlah kompilasi produk administrasi bid, sos, ekopol, hukum, HAM. Kedua indikator tersebut berada pada level interval terendah. Sehingga dengan adanya nilai terendah pada urusan persandian dan urusan statistik, maka menjadi beban cukup berat bagi Diskominfo. Dengan hasil evaluasi kelembagaan ini maka menjadi input dan advice bagi Diskominfo dalam merencanakan program kerja kedepan.

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perindustrian

Tabel 17

**Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perindustrian**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
A	Faktor Umum		

1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas untuk kop simpan pinjam	20	
2	Jumlah perangkat organisasi koperasi	40	
3	Jumlah pelaku usaha mikro	160	
4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam	160	
5	Jumlah koperasi	200	
		580	
			580
Jumlah A + B			750
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	750 x 1,1		825
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		825
2	Energi dan Sumber Daya Mineral		363
3	Perindustrian		363
	Jumlah		1551
	Tipologi		A

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Interpretasi terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah cukup beragam. Keragaman interpretasi ini tentu didasarkan pada perkembangan dan pertimbangan daerah masing-masing. Beberapa daerah menggabung antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa daerah lain memisahkan ketiga urusan tersebut menjadi masing-masing dinas yang berdiri sendiri, dan masih banyak interpretasi yang lain. Untuk Pemerintah Kota Balikpapan menata Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Perindustrian. Sehingga OPD ini membawahi tiga urusan. Sebagaimana dengan OPD yang lain, untuk

system, pola dan prosedur evaluasi kelembagaan melibatkan dua faktor penilaian; umum dan teknis.

Total nilai hasil evaluasi kelembagaan adalah 1551, kriteria tipologi A. Demikian maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka OPD tersebut diizinkan untuk memiliki 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Meskipun mendapatkan nilai dengan tipologi A, OPD ini memiliki kelemahan data untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Perindustrian. Sehingga pengelolaan dan pengembangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Perindustrian menjadi skala prioritas pengembangan.

16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 18
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu			
Urusan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah potensi usaha merupakan potensi investasi dalam Daerah	20	
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan	300	
3	Jumlah perusahaan penanaman modal	400	
			720
Jumlah A + B			890
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	890 x 1,1		979
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu membawahi satu urusan termasuk dalam urusan wajib pemerintah yang tidak termasuk kategori pelayanan dasar, namun masih dalam lingkup urusan konkuren pemerintah. Tugas dan fungsi OPD ini adalah bagaimana dapat menarik, meyakinkan, mengundang para investor untuk menanamkan modal di daerah. Faktor teknis diukur dengan tiga indikator teknis yaitu jumlah potensi usaha merupakan potensi investasi dalam daerah, jumlah dokumen perizinan dan non perizinan, dan jumlah perusahaan penanaman modal. Secara akumulasi nilai DPMPTSP sudah maksimal, 979 dengan kriteria tipologi A. Namun ada satu indikator yang memiliki raport merah yaitu jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah. 10 sektor investasi merupakan data yang sangat kecil jika dikorelasikan dengan rentang interval penilaian. Sehingga DPMPTSP Kota Balikpapan penting untuk menggali dan mengumpulkan data terkait dengan potensi usaha dan potensi investasi di daerah.

DPMPTSP tidak dapat bekerja dengan mengesampingkan konsep kolaborasi dan Kerjasama dengan instansi publik yang lain. Contoh, Dinas pertanian adalah salah satu organisasi perangkat publik, dimana faktor teknis diukur dengan kemudahan memberikan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan. Mengkoneksikan kedua alat ukur tersebut penting dan memungkinkan untuk dilakukan. Disatu sisi DPMPTSP mencari potensi usaha dan potensi investasi di daerah, disisi lain Dinas Pertanian berupaya membuka ruang izin usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan. Artinya bagaimana mengkoneksikan investor dengan peluang usaha di daerah.

Kesimpulan, DPMPTSP telah memiliki strength di dua indikator dan weaknesses di satu indikator. Tingginya jumlah dokumen perizinan dan non perizinan serta jumlah perusahaan penanaman modal semestinya berbanding lurus dengan tingginya potensi usaha dan potensi investasi di daerah. Sehingga miss atau tidak terkoneksi konsep ini harus ditemukan oleh penyelenggara administrasi pemerintah daerah. Namun demikian data kuantitatif dari hasil evaluasi kelembagaan DPMPTSP sangat baik; 979 dengan kriteria tipologi A. Oleh karena itu DPMPTSP disarankan untuk memiliki 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 19
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah kecamatan	20	
2	Jumlah desa-kelurahan atau nama lain	30	
3	Jumlah forum-forum dan tim di bidang kesbangpol yang telah dibentuk	200	
4	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktivitas	200	
5	jumlah potensi konflik dalam setahun	200	
6	Tingkat partisipasi pemilu (%) dalam periode sebelumnya	60	
			710
Jumlah A + B			880
C	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	880 x 1,1		968
D	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

18. Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

Tabel 20
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata			
1. Urusan/Bidang Pariwisata			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	

3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP):421	200	
2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif 81	100	
3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata 67	500	
			800
Jumlah A + B			970
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	970 x 1,1		1067
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
2. Urusan/Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pemuda kader:291	70	
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan:	120	
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga yang diikuti	100	
4	Jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga tetap	150	
			440
Jumlah A + B			610
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	610 x 1,1		671
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	Urusan/Bidang Pariwisata		1067

2	Urusan/Bidang Kepemudaan dan Olahraga	671
	Jumlah	1738
	Tipelogi	A

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata memmanage dua urusan yaitu Urusan atau Bidang Pariwisata dan Urusan atau Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Faktor teknis Urusan Pariwisata terdiri dari tiga urusan yaitu jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif 81; jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata. Dari ketiga indikator menunjukkan nilai atau skor maksimal. Ini menunjukkan bahwa urusan pariwisata dapat dikelola dengan baik dan menjadi modal utama dalam mendukung program-program pengembangan kepariwisataan. Tingginya jumlah usaha pariwisata didukung oleh ketersediaan zona kreatif dan banyaknya lokasi destinasi wisata di Balikpapan merupakan tiga faktor pendukung yang saling mensupport dan sinergi satu dengan lainnya. Dengan demikian maka logis kalau urusan pariwisata mendapatkan nilai maksimal; 1.067 dengan kriteria tipelogi A.

Urusan kedua adalah Urusan atau Bidang Kepemudaan dan Olahraga, menggunakan empat indikator teknis yaitu jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pemuda kader; jumlah organisasi kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan; jumlah kejuaraan/kompetisi olahraga yang diikuti; dan jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga tetap. Dari keempat indikator tersebut, hanya satu yang nilainya kurang maksimal yaitu jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pemuda kader. Oleh karena itu perangkat daerah ini perlu untuk melakukan evaluasi dan menggali data di masyarakat apa yang menyebabkan animo pemuda di Balikpapan cukup rendah untuk berpartisipasi dalam Gerakan pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader. Apabila indikator ini dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, maka berbanding lurus dengan ketiga indikator yang lain. Gerakan-gerakan pemuda tersebut akan menyebar dan berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi

kepemudaan, olahraga kepramukaan, dan juga berpartisipasi dalam kompetisi olahraga dala kejuaraan olahraga pelajar dan lain sebagainya.

Konklusinya adalah Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan dibuktikan nilai hasil evaluasi kelembagaan; 1.738 dengan kriteria tipologi A. Oleh karena itu Disporapar disarankan untuk memiliki 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

19. Dinas Perpustakaan Dan Arsip

Tabel 21
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Perpustakaan Dan Arsip

Dinas Perpustakaan dan Arsip			
1. Urusan/Bidang Perpustakaan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah pemustaka perbulan yang berkunjung (1231)	60	
2	Jumlah koleksi atau judul yang dimiliki: 40.864	100	
3	Jumlah perpustakaan yang seharusnya dibina ; 300	46	
4	Jumlah promosi gemar membaca per tahun; 9	4	
			210
Jumlah A + B			380
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$380 \times 1,1$		418
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
2. Kearsipan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	

2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah perangkat daerah kabupaten kota (termasuk kecamatan) dan BUMD yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis (384_	250	
2	Jumlah desa kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis (34)	30	
3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah (2014)	80	
		360	360
Jumlah A + B			530
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	530 x 1,1		583
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir	Nilai	
1	Urusan/Bidang Perpustakaan	418	
2	Kearsipan	583	
Jumlah		1001	
Tipelogi		B	

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Perpustakaan dan Arsip memiliki dua urusan yaitu Urusan/Bidang Perpustakaan dan urusan Kearsipan. Disputakar menjadi salah satu OPD yang menjalankan fungsi konkuren pemerintahan dalam kategori wajib dengan fokus bukan pelayanan dasar. Faktor teknis Urusan atau Bidang Perpustakaan terdiri dari jumlah pemustaka perbulan yang berkunjung (1231_60). Jumlah pemustaka Kota Balikpapan dalam periode evaluasi kelembagaan tahun 2022 termasuk rendah, karena dalam interval satu. Data ini mengandung makna tentang tingkat literasi masyarakat Balikpapan rendah. Rendahnya literasi maka berpengaruh pada kurang update pengetahuan. Dengan kondisi ini maka Disputakar bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan perlu membuat program bersama bagaimana meningkatkan minat baca pelajar dan warga Kota Balikpapan. Jumlah koleksi atau judul yang dimiliki: (40.864_100). Jika dikaitkan dengan indikator kedua, terkait dengan fasilitas, maka Disputakar telah memiliki kecukupan atau ketersediaan bahan bacaan. Dengan koleksi atau judul bahan

bacaan 40.864 mampu memberikan bahan bacaan yang lengkap. Namun disisi lain, kelemahan ada pada Urusan Perpustakaan, yaitu jumlah perpustakaan yang seharusnya dibina; (300_46). Kondisi ini perlu kaitkan dengan sumber daya manusia di OPD dimaksud. Jika memang kekurangan SDM maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu menambah jumlah SDM di Disputakar, khususnya urusan perpustakaan. Langkah lain yang juga sangat penting adalah melakukan promosi gerner membaca. Jumlah promosi gerner membaca per tahun; (9_4), data ini menunjukkan bahwa promosi secara kuantitas masih sangat kurang. Paling tidak Urusan Perpustakaan mengadakan kegiatan promosi 50 sd 100 kali dalam setahun untuk dapat meningkatkan jumlah pemustaka, meningkatkan literasi pelajar dan masyarakat Kota Balikpapan.

Kesimpulan untuk urusan perpustakaan belum menunjukkan kinerja yang baik, dari empat indikator yang digunakan, hanya satu yang mendapatkan nilai sedang (menengah). Sehingga kondisi ini berpengaruh pada total nilai urusan perpustakaan; 418 dengan kriteria tipologi C.

Urusan kedua adalah kearsipan yang diukur melalui tiga indikator teknis. Paparan urusan kearsipan tidak jauh berbeda dengan urusan perpustakaan. Dari tiga indikator hanya satu yang memberikan nilai baik. Sehingga akumulasi nilai urusan kearsipan belum maksimal; 530 dengan tipologi C. Penggabungan nilai urusan perpustakaan dan urusan kearsipan menghasilkan kriteria tipologi B. Dengan demikian Disputakar dalam pengembagn struktur organisasi mengacu pada ketentuan sebagai berikut; Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian. Dan bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

20. Dinas Perdagangan

Tabel 22
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan			
Urusan/Bidang Perdagangan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		

1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku	80	
2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi	10	
3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan	10	
4	Jumlah ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	200	
5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit	60	
6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten kota	250	
7	Jumlah pengecer minuman beralkohol	50	
			660
Jumlah A + B			830
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	830 x 1,1		913
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Dinas Perdagangan mengelola satu urusan yaitu urusan atau bidang perdagangan. Faktor teknis terdiri dari 7 indikator dengan tiga kategori nilai. Indikator dengan nilai tinggi antara lain; Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku; (17.421_80); Jumlah ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP); (368.402_200); Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten kota; (236_250); dan jumlah pengecer minuman beralkohol: 43 (50). Pengelolaan Balikpapan sebagai salah satu kota metropolitan di Kalimantan Timur tentu tidak terlepas bagaimana Dinas Perdagangan menawarkan program-program perdagangan baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun langkah strategis dalam menggandeng pedagang atau pengusaha dalam skala besar. Keempat indikator dengan nilai tinggi tersebut menjadi modal bagi Balikpapan dalam mempercepat atau memacu laju pertumbuhan ekonomi di Balikpapan. Contoh tinggi pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha merupakan indikator tentang awareness bagi pengusaha baik pemula maupun yang sudah mapan akan pentingnya izin usaha. Legalitas Usaha menjadi penting untuk menunjang segi permodalan maupun ekspansi atau

perluasan usaha. Tinggi kesadaran para pengusaha di Balikpapan dapat jadi modal bagi Dinas Perdagangan untuk membangun trust atau kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Balikpapan. Dinas perdagangan harus menjalin Kerjasama dan kolaborasi dengan DPMPTSP, Dinas pertanian dan dinas terkait dalam menguatkan iklim usaha di Balikpapan.

Namun disisi lain, terdapat beberapa indikator yang belum dapat mencapai nilai maksimal antara lain; Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit; (39_60); Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi; (13_10); Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan; (30_10). Dinas perdagangan tentu tidak bisa mengabaikan hal ini, terkait dengan komoditi ekspor, jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi; dan pendataan gudang-gudang untuk keperluan perdagangan tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Contoh terkait dengan kasus atau upaya bagaimana cara meningkatkan jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi. Ini penting kaitanya dengan akses petani dalam mendapatkan bantuan pemerintah berupa pupuk. Oleh karenanya bagaimana Dinas Perdagangan mampu membuat jembatan untuk menghubungkan program kerja antara pengusaha besar (distributor)-pengusaha kecil (pengecer)-Kelompok tani dan petani. Kembali kepada konsep kolaborasi harus dan Kerjasama harus digiatkan untuk mensukseskan program kerja OPD.

Kesimpulan, Dinas Perdagangan memiliki modal yang kuat yang dibuktikan dengan tingginya nilai empat indikator utama, apabila keempat modal tersebut dimaksimalkan fungsi, kontribusi dan potensinya maka akan dapat membantu percepatan dan memajukan program-program Dinas Perdagangan. Mengacu pada tabel di atas, Dinas Perdagangan mendapatkan skor maksimal (913) dengan kriteria tipologi A. Sehingga Dinas Perdagangan disarankan untuk memiliki 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Dan bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

21. Sekretariat Daerah

Tabel 23
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah Kecamatan	60	
2	Jumlah Desa/Kelurahan	10	
3	Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan)	160	
4	Jumlah Kebijakan Daerah	150	
5	Jumlah pegawai aparatur sipil negara	80	
6	Jumlah APBD Kabupaten/Kota	150	
			610
Jumlah A + B			780
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$780 \times 1,1$		858
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sekretariat daerah Kota Balikpapan pada tipologi A dengan nilai 858. Dengan kriteria tipologi A maka hal ini berimplikasi pada kebijakan internal dalam Menyusun struktur Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan. Dengan dasar kriteria tipologi A maka perlu disusun kebijakan sebagai berikut: Jumlah asisten maksimal 3 (tiga), dengan jumlah bagian pada masing-masing asisten maksimal 4 (empat) dan jumlah sub bagian pada masing-masing bagian maksimal 3.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka kondisi riil saat ini seyogyanya mengacu disesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Pengembangan (penambahan) atau perampingan struktur organisasi

perangkat daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil kajian evaluasi kebijakan tahun 2022. Pimpinan daerah dapat mengambil kebijakan untuk pembentukan perangkat daerah baru dengan beberapa pertimbangan, antara lain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Oleh karena itu jumlah asisten, bagian dan subbagian harus rasional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

22. Sekretariat Dewan

Tabel 24
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan		
Urusan Sekretariat Dewan		
A	Faktor Umum	
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50
		170
B	Faktor teknis	
1	Jumlah anggota DPRD	400
2	Jumlah fraksi DPRD	320
		720
Jumlah A + B		890
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)	
	$890 \times 1,1$	979
D.	Kesimpulan	A
	Skor	
	A : >800	
	B : 601 sd 800	
	C : 401 sd 600	
	Setingkat Bidang: 300 sd 400	
	setingkat Sub Bidang: <300	

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Konsep narasi untuk sekretariat dewan memiliki similaritas dengan sekretariat daerah. Nilai hasil evaluasi kelembagaan tahun 2022 Kota Balikpapan menunjukkan bahwa sekretariat dewan pada kriteria tipologi A dengan jumlah nilai 979. Nilai tersebut mengacu pada eviden terkait

jumlah anggota DPRD dan jumlah fraksi DPRD. Dengan dasar angka tersebut maka ketentuan yang berlaku adalah sekretariat dewan Kota Balikpapan berhak memiliki jumlah bagian sebanyak 4 dengan jumlah subbagian maksimal 3 pada masing-masing bagian.

23. Inspektorat

Tabel 25
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Inspektorat

Inspektorat			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah APBD kab kota	300	
2	Jumlah kecamatan	60	
3	Jumlah desa/kelurahan	20	
4	Jumlah perangkat daerah selain kecamatan	90	
5	Jumlah ASN	80	
			550
Jumlah A + B			720
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$720 \times 1,1$		792
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B: 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Inspektorat Pemerintah Kota Balikpapan dalam evaluasi kelembagaan tahun 2022 mendapatkan nilai 792 dengan kriteria tipologi B. Dengan capaian tipologi B, maka Inspektorat Kota Balikpapan dapat memiliki maksimal 3 inspektur pembantu (irban). Inspektur pembantu memiliki wewenang untuk membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan. Secara yuridis tipologi B yang dimiliki inspektorat ini tidak berdampak langsung terhadap haka atau otoritas

untuk menambah atau mengurangi jumlah auditor yang dimiliki oleh inspektorat.

24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Tabel 26
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)			
1. Urusan Perencanaan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah perangkat daerah kabupaten kota (tidak termasuk kecamatan); 28	280	
2	Jumlah komisi DPRD kabupaten kota:4	8	
3	Jumlah kecamatan:6	14	
4	Jumlah kelurahan, desa atau nama lain;34	10	
			312
Jumlah A + B			482
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	482 x 1,1		530
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah perangkat daerah kabupaten kota (termasuk kecamatan)	100	
2	Luas wilayah kabupaten kota (km ²)	40	
3	Jumlah kebijakan daerah kabupaten kota (perda dan perwali)	90	
			230
Jumlah A + B			400

C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	400 x 1,1		440
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		
No	Penilaian Akhir		Nilai
1	Urusan Perencanaan		530
2	Urusan Penelitian dan Pengembangan		440
	Jumlah		970
	Tipologi		B

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki dua urusan penting, yaitu perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Urusan perencanaan dinilai berdasarkan 4 indikator faktor teknis yaitu jumlah perangkat daerah kabupaten kota (tidak termasuk kecamatan); (28_280); jumlah komisi DPRD kabupaten kota (4_8); jumlah kecamatan (6_14); jumlah kelurahan, desa atau nama lain (34_10). Total nilai hasil evaluasi kelembagaan adalah 530 (kriteria tipologi C). Balikpapan dengan jumlah penduduk 710.293 dan luas wilayah mencapai 511,01 km², perlu dilakukan kajian rencana pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan. Dengan mencermati nilai hasil evaluasi pada setiap indikator teknis menunjukkan nilai yang rendah, hal ini dikarenakan data dukungannya mengacu pada data kependudukan dan data kewilayahan. Oleh karena itu kunci konsep pemekaran wilayah di Balikpapan perlu untuk menjadi pertimbangan penting.

Terkait dengan urusan penelitian dan pengembangan dinilai melalui tiga indikator antara lain jumlah perangkat daerah kabupaten kota (termasuk kecamatan; luas wilayah kabupaten kota (km²); dan jumlah kebijakan daerah kabupaten kota (perda dan perwali). Nilai ketiga indikator ini dalam interval rendah artinya terkait dengan urusan penelitian dan pengembangan diperlukan evaluasi mendasar untuk dapat menggali lebih jauh potensi-potensi yang dapat dilakukan oleh BAPPEDA. Nilai akhir hasil evaluasi; 440 dengan kriteria tipologi C. Penggabungan nilai kedua urusan adalah 970, namun demikian angka tersebut tidak dapat mengangkat tipologi menjadi A karena rumus dasarnya adalah tipologi C ditambah tipologi C maka akan naik satu tingkat menjadi tipologi

B. Sehingga BAPPEDA dapat mengembangkan struktur organisasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

25. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Tabel 27
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah APBD kabupaten/kota	250	
2	Jumlah pengguna anggaran	10	
3	Jumlah barang inventaris milik Daerah	30	
4	Jumlah objek pajak kabupaten/kota	200	
5	Luas wilayah kabupaten/kota	150	
			640
Jumlah A + B			810
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	810 x 1,1		891
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapatkan tugas pada urusan konkuren pemerintah. OPD ini juga dapat diinterpretasikan sebagai salah satu badan yang mengelola keuangan daerah. Sehingga perangkat daerah ini mendapatkan hak cukup istimewa mengingat pentingnya urusan yang harus dikelolanya. Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang

lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Namun ketentuan ini terkait dengan pasal berikutnya.

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

Mengacu pada total nilai hasil evaluasi kelembagaan; 891, kriteria tipologi A. Namun demikian OPD ini belum berhak mendapatkan atau melakukan kebijakan seperti dalam ketentuan di atas, dikarenakan nilai hasil evaluasi kurang dari 951.

26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

Tabel 28

Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kab kota	60	
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kab kota	160	
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kab kota	120	
			340
Jumlah A + B			510
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	$390 \times 1,1$		561
D.	Kesimpulan		C
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), pada hakikatnya memiliki beban kerja yang cukup berat, karena terkait dengan kerapian administrasi pengelolaan sumber daya manusia di Pemerintah Kota Balikpapan termasuk dalam Menyusun data base yang menjadi dasar karir ASN di Pemnerintahan Kota Balikpapan. Namun ironis, karena nilai hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan angka yang rendah. Indikator teknis BKPSDM diukur dengan tiga indikator yaitu: jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten kota; jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten kota; jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten kota. Dari ketiga indikator tersebut, termasuk dalam kategori interval penilaian rendah. Nilai total hasil evaluasi kelembagaan 561 dengan kriteria tipologi B.

27. Kecamatan Balikpapan Barat

Tabel 29
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Kecamatan Balikpapan Barat

Kecamatan Balikpapan Barat			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Luas Wilayah kecamatan 179,95 Km ²	200	
2	Jumlah kelurahan/desa 6 kel	140	
3	Jumlah penduduk 96.351	250	
			590
Jumlah A + B			760
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	760 x 1,1		836
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Evaluasi kelembagaan untuk perangkat daerah kecamatan, dilakukan dengan pola yang sama. Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari enam kecamatan dan akan dilakukan evaluasi kelembagaan untuk menentukan tipologi pada masing-masing kecamatan. Kecamatan Balikpapan Barat didukung oleh data sebagai berikut; luas wilayah kecamatan: 179,95 Km², jumlah kelurahan/desa: 6_140, jumlah penduduk: 96.351_250. Total nilai hasil evaluasi kelembagaan 830, kriteria tipologi A. Kecamatan tipe A dapat membentuk 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.

28. Kecamatan Balikpapan Selatan

Tabel 30
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Kecamatan Balikpapan Selatan

Kecamatan Balikpapan Selatan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Luas Wilayah kecamatan	120	
2	Jumlah kelurahan/desa	140	
3	Jumlah penduduk	250	
		510	510
Jumlah A + B			680
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	680 x 1,1		748
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B: 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Kecamatan Balikpapan selatan didukung oleh data sebagai berikut; luas wilayah kecamatan: 47,95 Km², jumlah kelurahan/desa: 7_140, jumlah penduduk: 150.528_250. Total nilai hasil evaluasi kelembagaan 748, kriteria tipologi B. Dari ketiga indikator, yang mencapai nilai maksimal

adalah dari sisi jumlah penduduk. Kecamatan tipe B dapat membentuk 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.

29. Kecamatan Balikpapan Kota

Tabel 31
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Kecamatan Balikpapan Kota

Kecamatan Balikpapan Kota			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Luas Wilayah kecamatan	120	
2	Jumlah kelurahan/desa	70	
3	Jumlah penduduk	250	
			440
Jumlah A + B			610
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	610 x 1,1		671
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Kecamatan Balikpapan Kota didukung oleh data sebagai berikut; luas wilayah kecamatan: 13.051Km²_120, jumlah kelurahan/desa: 5_140, jumlah penduduk: 85.162_250. Total nilai hasil evaluasi kelembagaan 671, kriteria tipologi B. Dari ketiga indikator, yang mencapai nilai maksimal adalah dari sisi jumlah penduduk. Rendahnya penilaian ini juga dipengaruhi oleh rendahnya nilai dari indikator kedua, karena jumlah kelurahan hanya 5. Kecamatan tipe B dapat membentuk 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.

30. Kecamatan Balikpapan Utara

Tabel 32
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Kecamatan Balikpapan Utara

Kecamatan Balikpapan Utara			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Luas Wilayah kecamatan	200	
2	Jumlah kelurahan/desa	140	
3	Jumlah penduduk	250	
			590
Jumlah A + B			760
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	680 x 1,1		836
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Kecamatan Balikpapan Utara didukung oleh data sebagai berikut; luas wilayah kecamatan: 13.824,51 Km²_200, jumlah kelurahan/desa: 6_140, jumlah penduduk: 176.365_250. Total nilai hasil evaluasi kelembagaan 836, kriteria tipologi A. Kecamatan tipe A dapat membentuk 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.

31. Kecamatan Balikpapan Timur

Tabel 33
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Kecamatan Balikpapan Timur

Kecamatan Balikpapan Timur			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170

B	Faktor teknis		
1	Luas Wilayah kecamatan	200	
2	Jumlah kelurahan/desa	70	
3	Jumlah penduduk	250	
			520
Jumlah A + B			690
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	690 x 1,1		759
D.	Kesimpulan		B
	Skor		
	A : >800		
	B: 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Kecamatan Balikpapan Timur didukung oleh data sebagai berikut; luas wilayah kecamatan: 137.158 Km²_120, jumlah kelurahan/desa: 4_70, jumlah penduduk: 85.903_250. Total nilai hasil evaluasi kelembagaan 759, kriteria tipologi B. Dari ketiga indikator, yang mencapai nilai maksimal adalah dari sisi jumlah penduduk. Rendahnya penilaian ini juga dipengaruhi oleh rendahnya nilai dari indikator kedua, karena jumlah kelurahan hanya 4. Kecamatan tipe B dapat membentuk 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.

32. Kecamatan Balikpapan Tengah

Tabel 34
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Kecamatan Balikpapan Tengah

Kecamatan Balikpapan Tengah			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Luas Wilayah kecamatan	200	
2	Jumlah kelurahan/desa	140	
3	Jumlah penduduk	250	

			590
Jumlah A + B			760
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	760 x 1,1		836
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B: 601 sd 800		
	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Kecamatan Balikpapan Tengah didukung oleh data sebagai berikut; luas wilayah kecamatan: 1.107 Km², jumlah kelurahan/desa: 6_140, jumlah penduduk: 697.079. Total nilai hasil evaluasi kelembagaan 836, kriteria tipologi A. Kecamatan tipe A dapat membentuk 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat dimaksud terdiri atas 2 (dua) subbagian.

33. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tabel 35
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Keuangan Dan Aset Daerah			
Urusan Keuangan			
A	Faktor Umum		
1	Jumlah penduduk Kota Balikpapan	80	
2	Luas wilayah Kota Balikpapan	40	
3	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	50	
			170
B	Faktor teknis		
1	Jumlah APBD kabupaten/kota	250	
2	Jumlah pengguna anggaran	40	
3	Jumlah barang inventaris milik Daerah	150	
4	Jumlah objek pajak kabupaten/kota	200	
5	Luas wilayah kabupaten/kota	120	
			760
Jumlah A + B			930
C.	Perkalian dengan faktor kesulitan geografis (Kalimantan 1.1)		
	930 x 1,1		1.023
D.	Kesimpulan		A
	Skor		
	A : >800		
	B : 601 sd 800		

	C : 401 sd 600		
	Setingkat Bidang: 300 sd 400		
	setingkat Sub Bidang: <300		

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Badan Keuangan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapatkan tugas pada urusan konkuren pemerintah. Sehingga perangkat daerah ini mendapatkan hak cukup istimewa mengingat pentingnya urusan yang harus dikelolanya. Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Namun ketentuan ini terkait dengan pasal berikutnya. Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

34. Rekapitulasi Tipologi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan hasil Evaluasi Kelembagaan Tahun 2022

Tabel 36
Hasil Penghitungan Instrumen 1 (PP No 18 Tahun 2016)
Rekapitulasi Tipologi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan hasil Evaluasi Kelembagaan Tahun 2022

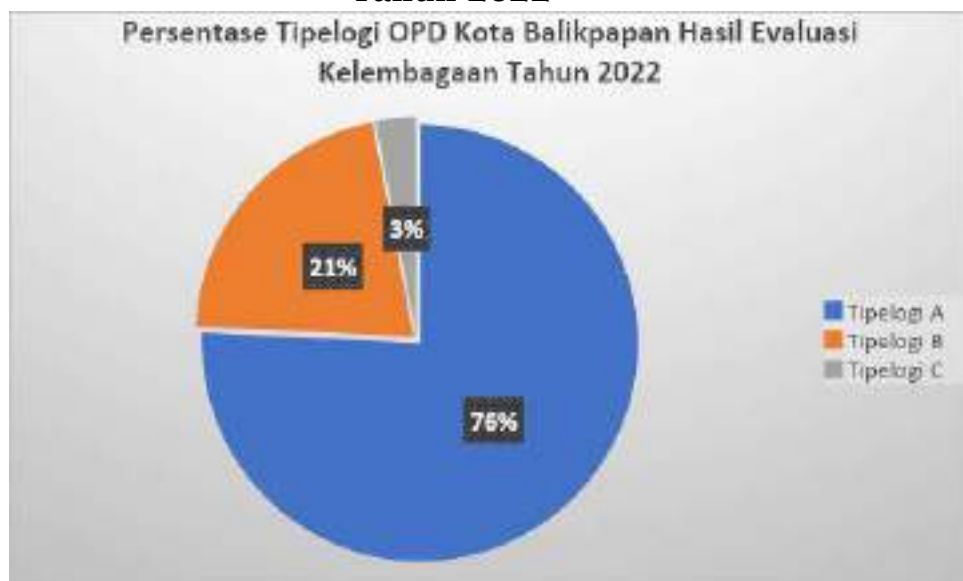
No	Organisasi Perangkat Daerah	Skor/Nilai	Tipologi
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1782	A
2	Dinas Kesehatan	825	A
3	Dinas pekerjaan Umum	807,4	A
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1452	A
5	Dinas Sosial	948,2	A
6	Dinas Ketenagakerjaan	825	A
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)	2.054,8	A
8	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1753	A
9	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	891	A
10	Dinas Lingkungan Hidup	1650	A
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	825	A
12	Dinas Perhubungan	851,4	A
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1665,5	A
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perindustrian	1551	A

15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	979	A
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	968	A
17	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	1738	A
18	Dinas Perdagangan	913	A
19	Sekretariat Daerah	858	A
20	Sekretariat Dewan	979	A
21	Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	891	A
22	Kecamatan Balikpapan Barat	836	A
23	Kecamatan Balikpapan Utara	836	A
24	Kecamatan Balikpapan Tengah	836	A
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1023	A
26	Dinas Perumahan dan Permukiman	607,2	B
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1001	B
28	Inspektorat	792	B
29	Bappeda	970	B
30	Kecamatan Balikpapan Selatan	748	B
31	Kecamatan Balikpapan Kota	671	B
32	Kecamatan Balikpapan Timur	759	B
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	561	C

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

36. Persentase Tipologi OPD Kota Balikpapan Hasil Evaluasi Kelembagaan Tahun 2022

Gambar 4
Persentase Tipologi OPD Kota Balikpapan Hasil Evaluasi Kelembagaan Tahun 2022



Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

5.1.2. Instrumen 2

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Tabel 37

Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	3
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3
	4	Standar Operasional Prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	2
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	4
	Jumlah		42
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik, penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi masih perlu untuk ditingkatkan, sudah dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan, namun masih perlu adanya umpan balik dan tindakan perbaikan.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan masih perlu untuk ditingkatkan. Mutu layanan sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun masih diperlukan pengukuran/ pengujian secara

berkala oleh tenaga yang bersertifikat dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih perlu ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun masih diperlukan adanya evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih perlu untuk ditingkatkan. Rencana pengembangan pegawai sudah dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, namun hasil (outcome) pengembangan pegawai masih perlu untuk **dievaluasi** secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih perlu untuk ditingkatkan. Analisis kebijakan yang berdampak ke publik sudah dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan. Namun Analisis kebijakan dan pemecahan masalah perlu menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, perlu melibatkan tim ahli dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur.

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah bagus. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah

dilakukan evaluasi secara berkala, namun masih perlu adanya pengendalian agar semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja sudah bagus. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan.

Pengembangan inovasi layanan sudah bagus. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi.

Budaya organisasi masih perlu untuk ditingkatkan. Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi, namun masih perlu adanya evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

2. Dinas Kesehatan

Tabel 38
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Kesehatan

2	Dinas Kesehatan		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3
	4	Standar Operasional Prosedur	4
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4.5
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		50
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

3.Dinas Pekerjaan Umum

Analisis:

1. Perencanaan.

Perencanaan sudah dilakukan dengan bagus. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah berjalan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

2. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan masih harus ditingkatkan lagi. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun masih perlu untuk dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

3. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih bisa ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih bisa ditingkatkan. Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, namun hasil (outcome) pengembangan pegawai masih harus dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

5. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

6. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

7. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun masih diperlukan pengendalian, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

8. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja masih bisa ditingkatkan. Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya. Masih perlu diupayakan agar pencapaian target kinerja perangkat daerah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

9. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah berjalan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

10. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 39
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Pekerjaan Umum

3	Dinas Pekerjaan Umum		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional Prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	5
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		51
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

4. Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 40
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Perumahan dan Permukiman

4	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional Prosedur	5
	5	Pendidikan dan Pelatihan	3
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		52
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan sudah dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian sudah dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur sudah dilakukan dengan baik. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah disusun untuk seluruh jabatan. Namun rencana pengembangan pegawai masih perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke

publik sudah melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa untuk ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun masih perlu pengendalian, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

5. Satpol PP

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan sudah dilakukan dengan perbandingan

hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian sudah dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan masih bisa ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun masih perlu dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun masih perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih bisa ditingkatkan lagi. Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, namun hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan lagi. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik sudah dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, namun masih diperlukan

keterlibatan tim ahli, dan perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun masih diperlukan pengendalian, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 41
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Satpol PP

5	Satpol PP		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3.5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4.5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	3.5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		47.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

6. Dinas Sosial (BELUM DIISI)

Tabel 42
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Sosial

6	Dinas Sosial		
	Variabel		
	1	Perencanaan	0
	2	Monitoring dan Evaluasi	0
	3	Penjaminan Mutu Layanan	0
	4	Standar Operasional prosedur	0
	5	Pendidikan dan Pelatihan	0
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	0
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	0
	8	Manajemen Resiko	0
	9	Pengukuran Kinerja	0
	10	Pengembangan inovasi layanan	0
	11	Budaya Organisasi	0
	Jumlah		0
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

7. Dinas Tenaga Kerja

Tabel 43
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Tenaga Kerja

7	Dinas Tenaga Kerja		
	Variabel		
	1	Perencanaan	3.5
	2	Monitoring dan Evaluasi	4
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3
	4	Standar Operasional prosedur	0
	5	Pendidikan dan Pelatihan	3
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	3.5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		41
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan masih bisa untuk ditingkatkan. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan sudah dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome), namun penentuan prioritas kegiatan perlu dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain, dan perlu dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi masih bisa ditingkatkan. Monitoring dan pengendalian sudah dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, dan perlu didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan masih harus ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun masih perlu dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur (belum ada isian)

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, namun rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih bisa ditingkatkan. Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, namun penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, dan sudah dilakukan evaluasi secara berkala, dan perlu dilakukan pengendalian, sehingga semua risiko

dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)

Tabel 44
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
(DP3AKB)

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)			
Variabel			
1	Perencanaan		2
2	Monitoring dan Evaluasi		5
3	Penjaminan Mutu Layanan		3
4	Standar Operasional prosedur		4
5	Pendidikan dan Pelatihan		2.5
6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah		2
7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur		2
8	Manajemen Resiko		1.5
9	Pengukuran Kinerja		5
10	Pengembangan inovasi layanan		5
11	Budaya Organisasi		5
Jumlah			37
Keterangan			
1	Sangat rendah		10 - 19
2	Rendah		19.1 - 28
3	Sedang		28.1 - 37
4	Tinggi		37.1 - 46
5	Sangat Tinggi		46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan masih harus ditingkatkan. Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut, namun masih perlu analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil yang (outcome), penentuan prioritas kegiatan perlu dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain, dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan masih harus ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, perlu dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih bisa ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, namun kemudian perlu disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, namun perlu dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, rencana

pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih harus ditingkatkan. Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan, namun masih perlu menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, melibatkan tim ahli dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih harus ditingkatkan. Penentuan penggunaan input proyek sudah dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan, namun analisis kebutuhan input/sumber daya proyek perlu distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih harus ditingkatkan. Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis risiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu, namun perangkat daerah perlu menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi, prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan perlu dilakukan evaluasi secara berkala, dan perlu pengendalian, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

9. Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Tabel 45
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan

9	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4.5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	3.5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	3.5
	8	Manajemen Resiko	3.5
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		46.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan dengan baik. Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, namun hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih harus ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal

dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, namun perlu melibatkan tim ahli, dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih harus ditingkatkan. Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, namun penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih harus ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi, namun prosedur pengelolaan risiko tersebut perlu dievaluasi secara berkala, perlu pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan cukup baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

10. Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang

Tabel 46
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang

10	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3.5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	3.5
	8	Manajemen Resiko	5
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	4
	Jumlah		46.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan dan mutu layanan masih harus ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun perlu dilakukan pengukuran/ pengujian

secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih perlu untuk ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih bisa ditingkatkan. Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, namun Hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih harus ditingkatkan. Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, namun penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko sudah dilakukan dengan baik. Perangkat Daerah sudah menerapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas

serta semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik, Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi masih bisa ditingkatkan. Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi, namun perlu upaya agar budaya organisasi tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

11. Dinas Lingkungan Hidup

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan

berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih perlu untuk ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan dengan baik. Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih harus ditingkatkan. Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan, namun perlu dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, perlu melibatkan tim ahli, dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko sudah dilakukan dengan baik. Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas serta semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 47
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Lingkungan Hidup

11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	4.5
	4	Standar Operasional prosedur	2.5
	5	Pendidikan dan Pelatihan	5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	2.5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4.5
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		49
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 48
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	3.5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	4
	5	Pendidikan dan Pelatihan	2.5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	2.5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		46.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi masih perlu untuk ditingkatkan. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan, namun perlu diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih bisa ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, namun dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih harus ditingkatkan. Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan, namun perlu dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, perlu melibatkan tim ahli, dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara

ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

13. Dinas Perhubungan

Tabel 49
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Perhubungan

13	Dinas Perhubungan		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	4.5
	4	Standar Operasional prosedur	3.5
	5	Pendidikan dan Pelatihan	2
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	5
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	4
	Jumlah		49
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, namun masih perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, namun dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan Hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko sudah dilakukan dengan baik. Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas serta semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi masih bisa ditingkatkan. Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi, namun perlu diupayakan agar budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

14. Dinas Komunikasi dan Informasi (BELUM DIISI)

Tabel 50
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Komunikasi dan Informasi

14	Dinas Komunikasi dan Informasi		
	Variabel		
	1	Perencanaan	0
	2	Monitoring dan Evaluasi	0
	3	Penjaminan Mutu Layanan	0
	4	Standar Operasional prosedur	0
	5	Pendidikan dan Pelatihan	0
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	0
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	0
	8	Manajemen Resiko	0
	9	Pengukuran Kinerja	0
	10	Pengembangan inovasi layanan	0
	11	Budaya Organisasi	0
	Jumlah		0
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Penjaminan Mutu Layanan
4. Standar Operasional Prosedur
5. Pendidikan dan Pelatihan
6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah
7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur
8. Manajemen Risiko
9. Pengukuran Kinerja
10. Pengembangan inovasi layanan
11. Budaya Organisasi

15. Dinas Koperasi dan UMKM

Tabel 51
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Koperasi dan UMKM

15	Dinas Koperasi dan UMKM		
	Variabel		
	1	Perencanaan	3
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	3
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	3
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	3
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		41
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan masih harus ditingkatkan. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan sudah dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome), namun penentuan prioritas kegiatan perlu dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain, dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan masih harus ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun perlu dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, namun rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan,

dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih harus ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, perlu melibatkan tim ahli, dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih harus ditingkatkan. Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, namun penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan mutu layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur sudah dilakukan dengan baik. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan dengan baik. Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik sudah melibatkan tim ahli, namun perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek sudah dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 52
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	5
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4.5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		52.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

17. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Analisis:

1. Perencanaan

Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan

berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur sudah dilakukan dengan baik. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan sudah dilakukan dengan baik. Hasil (outcome) pengembangan pegawai sudah dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik sudah melibatkan tim ahli, namun perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik

(diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 53
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	5
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4.5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		52.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

18. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil

(outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi masih harus ditingkatkan. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan, namun perlu diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan masih harus ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun perlu dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan. Perlu adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun secara parsial untuk jabatan tertentu, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai

yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli, namun perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih harus ditingkatkan. Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, namun penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko masih harus ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi, namun perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan perlu pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan masih bisa ditingkatkan. Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan, namun perangkat daerah perlu mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 54
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

18	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata		
	Variabel		
	1	Perencanaan	4.5
	2	Monitoring dan Evaluasi	3.5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3.5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	1
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	3.5
	8	Manajemen Resiko	3
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	4
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		39
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

19. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring masih harus ditingkatkan. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan, namun perlu diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan masih harus ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun perlu dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan. Perlu adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun secara parsial untuk jabatan tertentu, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli, namun perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen sumber daya yang terukur masih harus ditingkatkan. Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis

kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan, namun analisis kebutuhan input/sumber daya proyek perlu distandarisi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja masih bisa ditingkatkan. Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya, namun pencapaian target kinerja perangkat daerah perlu diukur dan diupayakan tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan masih harus ditingkatkan. Perlu adanya rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis, pengembangan produk perlu dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi), perlu disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya, perlu adanya inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan, perangkat daerah perlu mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya Organisasi masih harus ditingkatkan. Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun perlu adanya dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah

yang bersangkutan, perlu adanya program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi, budaya organisasi diupayakan tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 55
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Perpustakaan dan Arsip

19	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	3
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	1
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	2
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	4
	10	Pengembangan inovasi layanan	1
	11	Budaya Organisasi	2
	Jumlah		31
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

20. Dinas Perdagangan

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk

umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, namun perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, namun perlu adanya dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai yang disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli, namun perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara

ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 56
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Perdagangan

20	Dinas Perdagangan		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	4.5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	4.5
	4	Standar Operasional prosedur	3
	5	Pendidikan dan Pelatihan	2
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		46.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

21. Sekretariat Daerah

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan masih harus ditingkatkan. Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut, namun penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan perlu dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome), penentuan prioritas kegiatan perlu dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain, dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, namun perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan. Perlu adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada

perangkat daerah yang bersangkutan, perlu adanya dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli, dan perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 57
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Sekretariat Daerah

21	Sekretariat Daerah		
	Variabel		
	1	Perencanaan	2
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	3
	5	Pendidikan dan Pelatihan	1
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		43.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

22. Sekretariat Dewan

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan masih harus ditingkatkan. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome), namun penentuan prioritas kegiatan perlu dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan

dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain, dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi masih harus ditingkatkan. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan, namun monitoring dan pengendalian perlu dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan, perlu diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan belum dilakukan. Perlu ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan, penjaminan mutu produk dan proses kerja perlu dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan, mutu produk dan proses perlu distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, perlu dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan belum dilakukan. Perlu adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan, perlu adanya dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai yang sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu

disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur belum dilakukan. Penggunaan sumber daya perlu dilakukan berdasarkan ketentuan formal yang berlaku, penentuan penggunaan input proyek perlu dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan, analisis kebutuhan input/sumber daya proyek perlu distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih harus ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi, namun perlu dilakukan evaluasi secara berkala, dan perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja masih harus ditingkatkan. Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan, namun perlu dilakukan pengukuran pencapaiannya, dan pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan diupayakan tercapai

dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan masih harus ditingkatkan. Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi), namun perlu disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya, perlu adanya inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan, dan perangkat daerah perlu mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi belum ada. Perlu adanya budaya organisasi pada perangkat daerah, perlu adanya slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan, perlu dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan, perlu ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi, dan budaya organisasi diupayakan tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 58
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Sekretariat Dewan

22	Sekretariat Dewan		
	Variabel		
	1	Perencanaan	3
	2	Monitoring dan Evaluasi	2
	3	Penjaminan Mutu Layanan	0
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	0
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	0
	8	Manajemen Resiko	3
	9	Pengukuran Kinerja	3.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	2
	11	Budaya Organisasi	0
	Jumlah		20.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

23. Inspektorat

Tabel 59
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Inspektorat

23	Inspektorat		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3
	4	Standar Operasional prosedur	3
	5	Pendidikan dan Pelatihan	3
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	4
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		46
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan masih harus ditingkatkan. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun perlu dilakukan pengukuran/ pengujian secara

berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan. Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, namun perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, namun rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli, namun perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih bisa ditingkatkan. Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, namun perlu didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada

perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan

berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur sudah dilakukan dengan baik. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih bisa ditingkatkan lagi. Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 60
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	4.5
	4	Standar Operasional prosedur	4.5
	5	Pendidikan dan Pelatihan	4
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4.5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		51
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

5. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Tabel 61
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

25	Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		
	Variabel		
	1	Perencanaan	1
	2	Monitoring dan Evaluasi	1.5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	2.5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	0
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	3
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	2
	8	Manajemen Resiko	2
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		29
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan masih harus ditingkatkan lagi. Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur, namun penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan perlu dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut, penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan perlu dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome), penentuan prioritas kegiatan perlu dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain, dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi masih harus ditingkatkan lagi. Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur, namun monitoring dan pengendalian perlu dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan, monitoring dan pengendalian perlu dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan, diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan masih harus ditingkatkan lagi. Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun mutu produk dan proses perlu distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, perlu dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan belum dilakukan. Perlu adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan

dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih harus ditingkatkan lagi. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, namun perlu melibatkan tim ahli, dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih harus ditingkatkan lagi. Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan, namun analisis kebutuhan input/sumber daya proyek perlu distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah, penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perlu dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko masih harus ditingkatkan lagi. Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis risiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu, namun perangkat daerah perlu menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi, perlu dilakukan evaluasi secara berkala, dan perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

Tabel 62
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	2
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		48
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan sudah dilakukan dengan baik. Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih harus ditingkatkan lagi. Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan, namun analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, perlu melibatkan tim ahli, dan perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya Organisasi sudah dilakukan dengan baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

27. Kecamatan Balikpapan Barat

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan masih harus ditingkatkan lagi. Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan, mutu produk dan proses perlu distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, perlu dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan lagi. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, namun rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih belum dilakukan. Perlu adanya analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur, analisis kebijakan yang

berdampak ke publik perlu dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan, perlu metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, perlu melibatkan tim ahli, dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi belum ada. Perlu adanya budaya organisasi pada perangkat daerah, perlu adanya slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan, perlu adanya dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan, perlu adanya program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi, dan budaya organisasi perlu tercermin dalam sikap dan

perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 63
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Kecamatan Balikpapan Barat

27	Kecamatan Balikpapan Barat		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	2
	4	Standar Operasional prosedur	3
	5	Pendidikan dan Pelatihan	3
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	0
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	0
	Jumlah		37
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

28. Kecamatan Balikpapan Selatan

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan masih harus ditingkatkan lagi. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome), namun penentuan prioritas kegiatan perlu dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain, dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk

umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, namun perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih perlu ditingkatkan lagi. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, namun rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih bisa ditingkatkan lagi. Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, namun didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan masih bisa ditingkatkan lagi. Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan, namun perangkat daerah perlu mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 64
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Kecamatan Balikpapan Selatan

28	Kecamatan Balikpapan Selatan		
	Variabel		
	1	Perencanaan	3
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	3.5
	5	Pendidikan dan Pelatihan	3
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	4
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	4
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		46
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

29. Kecamatan Balikpapan Kota (BELUM DIISI)**Tabel 65****Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Kecamatan Balikpapan Kota**

29	Kecamatan Balikpapan Kota		
	Variabel		
	1	Perencanaan	0
	2	Monitoring dan Evaluasi	0
	3	Penjaminan Mutu Layanan	0
	4	Standar Operasional prosedur	0
	5	Pendidikan dan Pelatihan	0
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	0
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	0
	8	Manajemen Resiko	0
	9	Pengukuran Kinerja	0
	10	Pengembangan inovasi layanan	0
	11	Budaya Organisasi	0
	Jumlah		0
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

30. Kecamatan Balikpapan Utara**Tabel 66****Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Kecamatan Balikpapan Utara**

30	Kecamatan Balikpapan Utara		
	Variabel		
	1	Perencanaan	4.5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	2.5
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	0
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	4.5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		42.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan lagi. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, namun dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil

(outcome) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih belum dilakukan. Perlu adanya analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur, analisis kebijakan yang berdampak ke publik perlu dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan, perlu dilakukan dengan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, perlu melibatkan tim ahli, dan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

31. Kecamatan Balikpapan Timur

Tabel 67
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Kecamatan Balikpapan Timur

31	Kecamatan Balikpapan Timur		
	Variabel		
	1	Perencanaan	4.5
	2	Monitoring dan Evaluasi	5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	5
	4	Standar Operasional prosedur	3
	5	Pendidikan dan Pelatihan	3
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	4
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	4
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		47.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk

umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih perlu ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, namun perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih perlu ditingkatkan lagi. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, namun rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih bisa ditingkatkan lagi. Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, namun perlu didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, sudah dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan masih bisa ditingkatkan lagi. Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan, namun perangkat daerah perlu mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah bagus. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan

32. Kecamatan Balikpapan Tengah

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi masih harus ditingkatkan lagi. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan, namun perlu diikuti

dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik, dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan sudah dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih harus ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, namun perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan masih harus ditingkatkan lagi. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, namun perlu adanya dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah sudah dilakukan dengan baik. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur sudah dilakukan dengan baik. Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara

ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan sudah dilakukan dengan baik. Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi sudah baik. Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 68
Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018)
Kecamatan Balikpapan Tengah

32	Kecamatan Balikpapan Tengah		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	3.5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	4.5
	4	Standar Operasional prosedur	3
	5	Pendidikan dan Pelatihan	2
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	5
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	5
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	5
	10	Pengembangan inovasi layanan	5
	11	Budaya Organisasi	5
	Jumlah		47
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

33. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 69

Hasil Penghitungan Instrumen 2 (PERMENDAGRI NO 99 Tahun 2018) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

33	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Variabel		
	1	Perencanaan	5
	2	Monitoring dan Evaluasi	4.5
	3	Penjaminan Mutu Layanan	3.5
	4	Standar Operasional prosedur	2
	5	Pendidikan dan Pelatihan	2
	6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah	4
	7	Manajemen Sumber Daya Yang Terukur	4
	8	Manajemen Resiko	4
	9	Pengukuran Kinerja	4.5
	10	Pengembangan inovasi layanan	3
	11	Budaya Organisasi	3
	Jumlah		39.5
	Keterangan		
	1	Sangat rendah	10 - 19
	2	Rendah	19.1 - 28
	3	Sedang	28.1 - 37
	4	Tinggi	37.1 - 46
	5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

Analisis:

1. Perencanaan

Perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.

3. Penjaminan Mutu Layanan

Penjaminan Mutu Layanan masih harus ditingkatkan lagi. Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal, namun perlu dilakukan pengukuran/ pengujian

secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat, dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

4. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur masih perlu ditingkatkan lagi. Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), namun perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan masih harus ditingkatkan lagi. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu, namun dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai perlu disusun untuk seluruh jabatan, rencana pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan, dan hasil (outcome) pengembangan pegawai perlu dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

Analisis kebijakan dan pemecahan masalah masih bisa ditingkatkan lagi. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli, namun perlu melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.

7. Manajemen Sumber Daya Yang Terukur

Manajemen Sumber Daya Yang Terukur masih bisa ditingkatkan lagi. Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk, namun perlu didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko masih bisa ditingkatkan lagi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, dilakukan evaluasi secara berkala, namun perlu adanya pengendalian sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.

9. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dengan baik. Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.

10. Pengembangan inovasi layanan

Pengembangan inovasi layanan masih perlu ditingkatkan lagi. Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya, namun perlu inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan, dan perangkat daerah perlu mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan

11. Budaya Organisasi

Budaya organisasi masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan, perlu adanya program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi, dan budaya organisasi perlu dicerminkan dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 70
Rata-Rata Kematangan OPD

No	OPD	Nilai Kematangan OPD
1	Dinas Pendidikan (Disdik)	42
2	Dinas Kesehatan (Dinkes)	50
3	Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	51
4	Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim)	52
5	Satpol PP	47.5
6	Dinas Sosial (Dinsos)	0
7	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	41
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	37
9	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPPP)	46.5
10	Dinas Pertanahan dan Pentaan Ruang (DPPR)	46.5
11	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	49
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	46.5
13	Dinas Perhubungan (Dishub)	49
14	Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)	0
15	Dinas Koperasi dan UKM	41
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	52.5
17	Badan Kesbangpol	52.5
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	39
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dinpusar)	31
20	Dinas Perdagangan (Disdag)	46.5
21	Sektariat Daerah (Setda)	43.5
22	Sekretariat Desa (Setwan)	20.5
23	Inspektorat	46
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	51
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD)	29
26	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	48
27	Kec. Balbar	37
28	Kec. Balsel	46
29	Kec. Balkot	0
30	Kec. Baltara	42.5
31	Kec. Baltim	47.5
32	Kec. Balteng	47
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	39.5
	Jumlah skor	1318
	Dibagi jumlah OPD	33
	Rata-rata	39.94
Keterangan		
1	Sangat rendah	10 - 19
2	Rendah	19.1 - 28
3	Sedang	28.1 - 37
4	Tinggi	37.1 - 46
5	Sangat Tinggi	46.1 - 55

Sumber: Hasil Perhitungan, 2022

4.3. Instrumen 3

ANALISIS DATA INSTRUMEN 3 DAN 4 EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Seluruh data yang terkumpul melalui isian instrumen III dan IV dapat tersaji hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 71.
Nilai Dimensi

No	Perangkat Daerah	Dimensi Struktur			Dimensi Proses					Jumlah	Rank
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Disdik	14,234	9,822	9,088	7,504	6,426	5,625	7,083	6,5	66,282	P-4
2	Dinkes	14,234	9,822	10,952	9,688	10,003	8,125	9,168	7,5	74,492	P-4
3	DisPU	14,93	9,822	11,644	10	8,931	7,5	10,002	8	80,829	P-4
4	Disperkim	16,32	8,481	8,52	9,064	8,571	6,25	7,5	6	70,706	P-4
5	Satpol PP	13,887	8,481	9,088	10	8,213	6,875	5,832	7	69,376	P-4
6	BPBD	14,581	7,588	8,804	7,19	6,427	5,625	7,5	6	63,715	P-4
7	Dinsos	13,545	7,813	8,857	10	8,213	6,875	7,5	7	69,803	P-4
8	Disnaker	14,588	8,336	11,983	7,191	8,571	8,125	7,083	8,5	74,377	P-4
9	DP3AKB	14,929	8,034	8,804	7,191	6,783	6,25	5,832	6,5	64,323	P-4
10	Dinas Pangan, Pertanian & Perikanan	14,929	8,481	8,804	8,44	7,498	6,875	7,5	7,5	70,027	P-4
11	Dinas Pertanahan & Tata Ruang	14,931	7,588	9,94	10	8,93	6,875	8,334	8	74,598	P-4
12	DLH	14,234	8,481	9,088	7,504	7,14	7,5	5,832	7	66,779	P-4
13	Disdukcapil	17,014	10,715	9,372	9,688	10,003	9,375	9,585	9,5	85,252	P-5
14	Dishub	14,582	8,035	9,088	7,504	7,14	7,5	7,5	7,5	68,849	P-4

15	Diskominfo	13,541	7,588	9,372	8,751	7,497	6,25	6,666	9,5	69,165	P-4
16	DiskopUMKM	15,625	8,928	9,088	8,128	7,497	6,875	7,5	7	70,641	P-4
17	DPMPTSP	14,585	8,928	8,52	9,688	9,645	6,875	7,083	8,5	73,824	P-4
18	Badan Kesbangpol	9,899	9,376	10,941	7,503	6,069	6,875	8,334	9,5	68,497	P-4
19	Disporawis	14,236	8,034	8,804	7,504	7,14	6,875	9,168	7	68,761	P-4
20	Disperpus Arsip	13,542	9,375	11,076	8,752	9,287	8,125	7,5	8	75,657	P-4
21	Disdag	15,277	8,481	9,088	8,752	7,497	6,875	7,5	8,5	71,97	P-4
22	Sekretariat Daerah	16,671	8,336	11,983	6,565	7,497	6,25	7,5	7	71,802	P-4
23	Sekretariat DPRD	16,671	8,336	11,983	9,064	8,571	6,875	7,917	9,5	78,917	P-4
24	Inspektorat	11,641	8,856	13,025	7,816	7,855	6,875	7,5	7	70,568	P-4
25	Bappeda Litbang	12,843	10,269	9,94	8,44	8,214	6,875	6,667	7,5	70,748	P-4
26	BPPD & Retribusi Daerah	14,587	7,813	12,503	10	8,213	6,875	7,5	9	76,491	P-4
27	BKPSDM	13,888	8,928	10,508	10	9,645	5,625	7,083	8	73,677	P-4
28	Kec. Bpn Barat	14,583	9,822	9,656	10	10,003	7,5	7,083	7,5	76,147	P-4
29	Kec. Bpn Selatan	15,972	8,928	7,384	7,816	7,497	6,875	7,5	7,5	69,472	P-4
30	Kec. Bpn Kota	15,623	9,822	10,224	8,752	7,855	8,125	7,917	10	78,318	P-4
31	Kec. Bpn Utara	16,32	8,928	7,384	7,816	7,497	6,875	7,5	7,5	69,815	P-4
32	Kec. Bpn Timur	15,972	8,928	7,384	7,816	7,497	6,875	7,5	7,5	69,472	P-4
33	Kec. Bpn Tengah	13,887	8,481	8,804	7,504	7,141	6,25	7,083	7	66,15	P-4
34	BKAD	13,888	9,822	10,792	9,064	8,571	6,25	7,083	8	73,47	P-4

Tabel nilai dimensi tersebut di atas menunjukkan bahwa:

1. Dari 34 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, **satu Perangkat Daerah hasilnya berada pada Peringkat Komposit 5 (P-5) dengan skor 85,252 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan**, dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir

kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

2. Dari 34 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, **33 Perangkat Daerah hasilnya berada pada Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan skor antara 61 – 80**, dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Analisis untuk tiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan berdasarkan Lampiran I PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 mengacu pada struktur bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 72.
Struktur Bobot Penilaian

Dimensi	Bobot dan Nilai Dimensi	Bobot dan Nilai Total Keseluruhan
Struktur Organisasi (50%)	Kompleksitas Struktur (50%)	Kompleksitas Struktur (25%)
	Formalisasi Struktur (25%)	Formalisasi Struktur (12,53 %)
	Sentralisasi Struktur (25%)	Sentralisasi Struktur (12,5%)
	Keselarasan (<i>Alignment</i>) (20%)	Keselarasan (<i>Alignment</i>) (10%)
	Tata Kelola (<i>Governance</i>) dan Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	Tata Kelola (<i>Governance</i>) dan Kepatuhan (<i>Compliance</i>)

Proses (50%)	(20%)	(10%)
	Perbaikan dan Peningkatan Proses (20%)	Perbaikan dan Peningkatan Proses (10%)
	Teknologi Informasi (20%)	Teknologi Informasi (10%)
	Manajemen Risiko (20%)	Manajemen Risiko (10%)
	Total	100%

Sumber: Bab III Lampiran I PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018

Adapun analisis untuk tiap Perangkat Daerah yang diteliti terjabar masing-masing sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,234. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 56,936%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,822. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 78,576%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,088. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 72,704%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

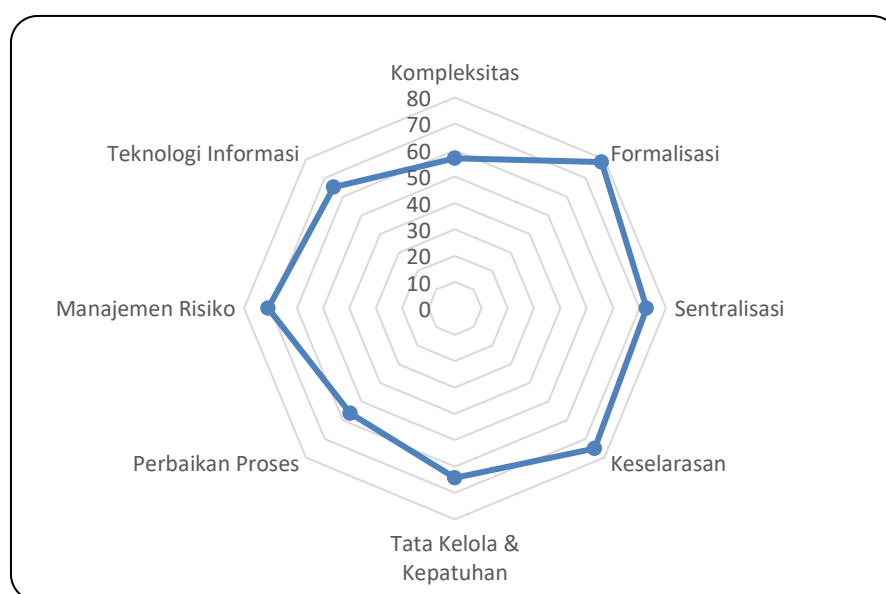
- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,504. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75,04%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,426. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 64,26%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah

5,625. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 56,25%.

- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,083. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 70,83%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,5. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 65%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 1.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 66,282 maka Dinas Pendidikan Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa

kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marjinal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, desain organisasi sangat perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain karena:
 - Tingkatan unit organisasinya perlu penyesuaian tugas dan fungsi dari tingkatan yang paling atas hingga paling bawah;
 - Tugas dan fungsi unit organisasi belum bersifat spesifik yang menggambarkan keragaman kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang, misalnya Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang semestinya menangani hal-hal yang terkait SDM (tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan), namun dalam uraian tugas dan fungsinya menangani perizinan dan kurikulum muatan lokal (dalam Perwali Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022).
 - Instansi vertikal atau UPT yang ada saat ini perlu penyesuaian yang jumlahnya menunjukkan adanya indikasi melebihi kebutuhan;
 - Nomenklatur unit organisasi sangat perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya;
 - Tugas dan fungsi unit organisasi serta mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu perumusan secara lebih jelas sesuai strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerjanya;
 - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara lebih jelas sesuai dengan strategi organisasi;
 - Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum sesuai peraturan perundangan;
- Seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum dipetakan dengan baik;
- Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja pada tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur dan akuntabilitas.

2. Dinas Kesehatan

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,234. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 56,936%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,822. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 78,576%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10,952. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 87,616%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

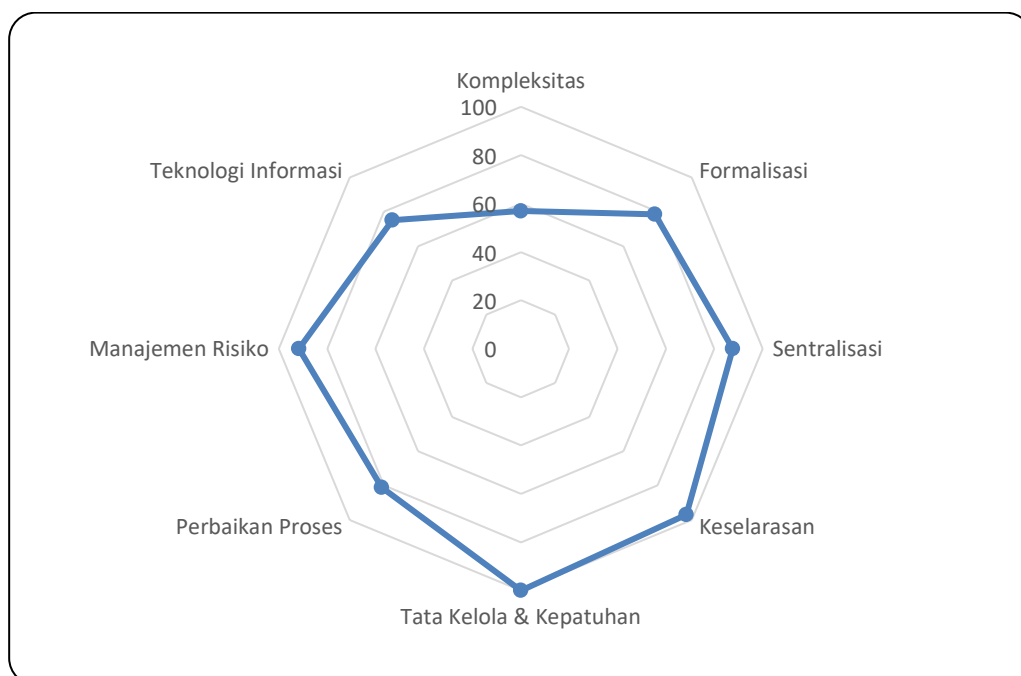
- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,688. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 96,88%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10,003.

Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 100%.

- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,125. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 81,25%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,168. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 91,68%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,5. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 75%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar 2 yang tersaji pada halaman selanjutnya.

Grafik 2.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 74,492 maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses

organisasi, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marjinal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Balikpapan hanya terdapat pada dimensi struktur organisasinya dimana desain organisasi sangat perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain karena:

- Tingkatan unit organisasinya perlu penyesuaian tugas dan fungsi dari tingkatan yang paling atas hingga paling bawah;
- Jumlah instansi vertikal atau UPT yang ada saat ini menunjukkan belum mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan;
- Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
- Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
- Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
- Tugas dan fungsi unit organisasi serta mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu perumusan secara lebih jelas sesuai strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerjanya;
- Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah

3. Dinas Pekerjaan Umum

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,930. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 59,720%.

- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,822. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 78,576%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 11,644. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 93,152%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

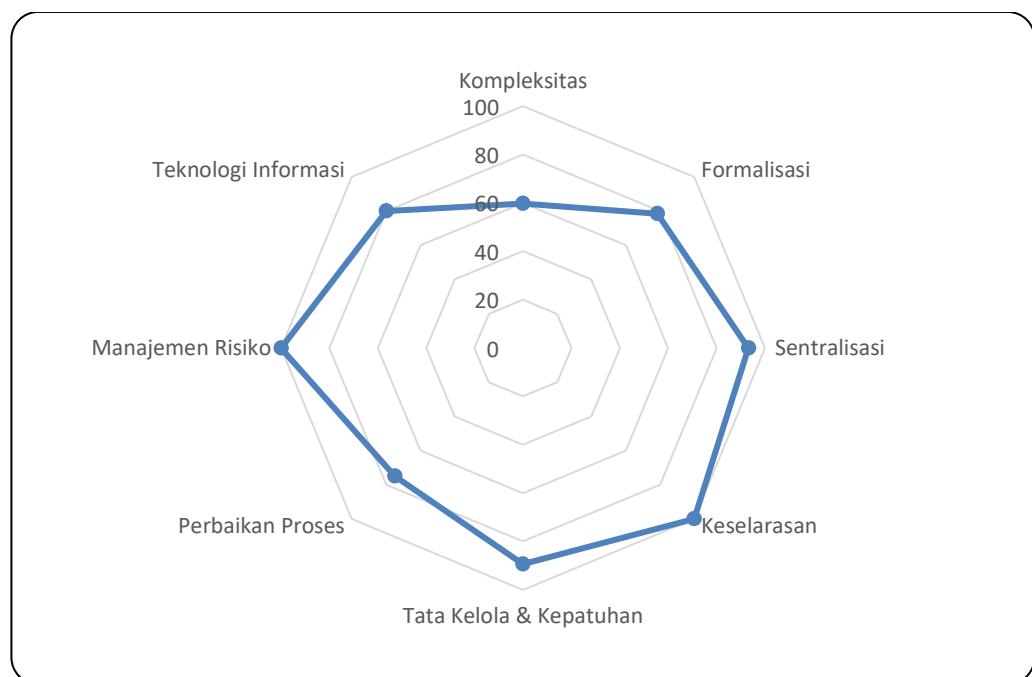
- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 100%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,931. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 89,31%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,50. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10,002. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 100%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 80%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti

dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar 3 yang tersaji pada halaman berikutnya.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 80,829 maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal.

Grafik 3.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, desain organisasi sangat perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain karena:
 - Jumlah instansi vertikal atau UPT, cabang dinas atau UPTD yang ada saat ini melebihi kebutuhan;

- Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
 - Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah namun tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum sesuai peraturan perundangan.

4. Dinas Perumahan dan Permukiman

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 16,320. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 65,280%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,481. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 67,848%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,520. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 68,160%.

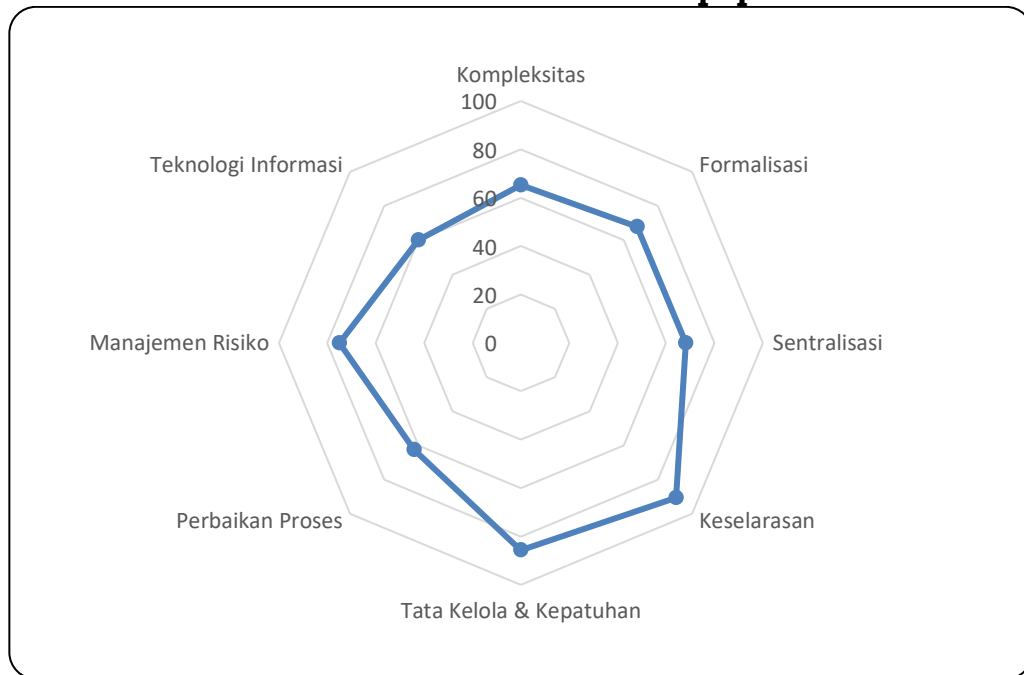
Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata

Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,064. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 90,64%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,571. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 85,71%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,250. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 62,50%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,50. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 60%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar 4 yang tersaji pada halaman berikutnya

Grafik 4.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 70,706 maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, antara lain:
 - Penataan perangkat daerah belum ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Misalnya untuk Bidang PSU yang saat ini berada di bawah Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
 - Instansi vertikal atau UPT yang ada saat ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebab jumlahnya dan/atau cabang dinas/UPTD melebihi kebutuhan;

- Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya;
- Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
- Tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya;
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral belum dituangkan dalam keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.

2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi belum dipublikasikan secara periodik di dalam *website* organisasi.

5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 13,887. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 55,548%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,481. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 67,848%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,088. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 72,704%.

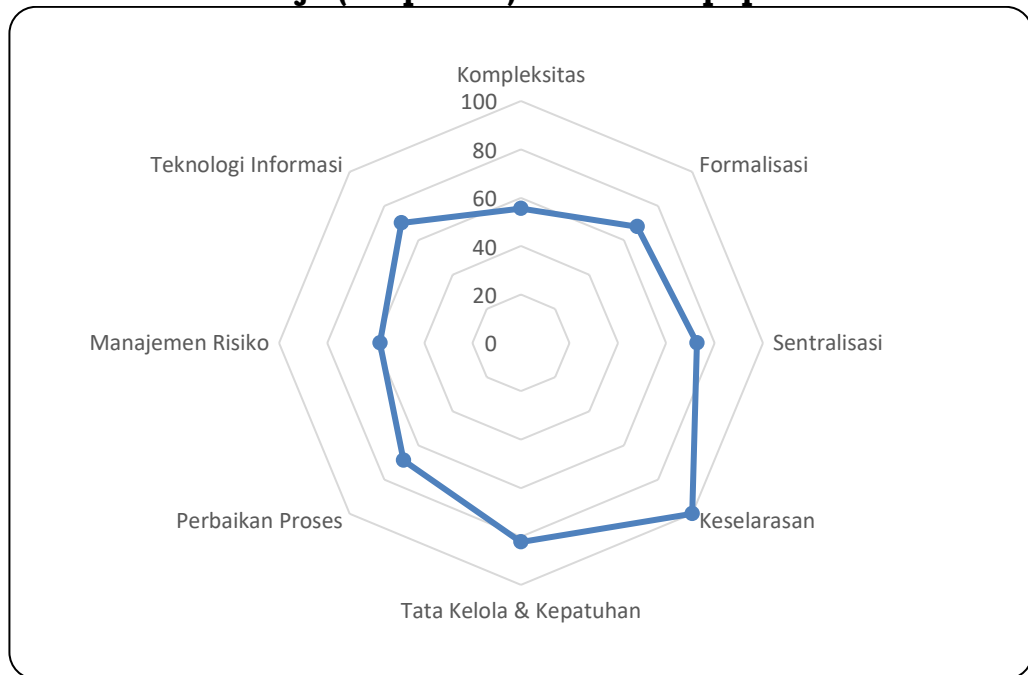
Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 100%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,213. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 82,31%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,875. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 68,75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 5,832. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 58,32%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 70%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 5.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 69,376 maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Instansi vertikal atau UPT yang ada saat ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab jumlahnya dan/atau cabang dinas/UPTD melebihi kebutuhan;
 - Instansi vertikal atau UPT dan/atau cabang dinas/UPTD yang dibentuk belum dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan organisasi;

- Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
 - Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah namun tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya, namun tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:
- Manajemen risiko organisasi belum diperkenalkan di dalam organisasi sebab belum terdapat kebijakan manajemen risiko yang memadai pada organisasi;
 - Organisasi belum memiliki sistem *monitoring* risiko yang memadai;
 - Organisasi belum memiliki kebijakan IT (*e-gov*) yang memadai.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,581. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 58,324%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,588. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 60,704%.

- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,804. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 70,432%.

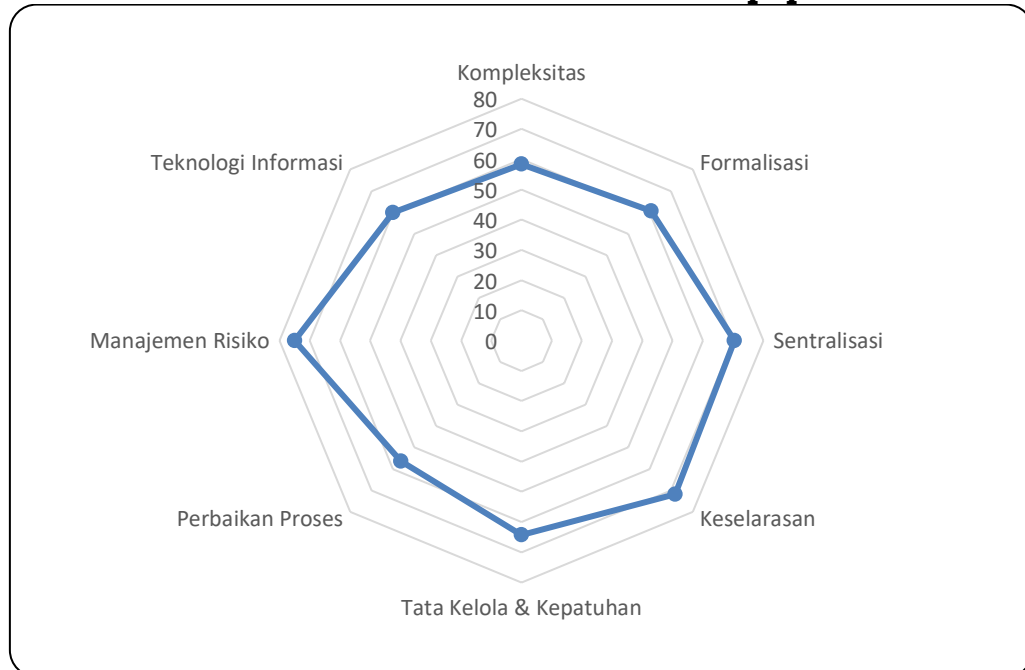
Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,19. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 71,90%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,427. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 64,27%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 5,625. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 56,25%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,50. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 60%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 6.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 63,715 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marjinal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, antara lain:
 - Penataan perangkat daerah belum ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - Jumlah instansi vertikal atau UPT dan/atau cabang dinas/UPTD yang ada saat ini melebihi kebutuhan;
 - Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;

- Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
 - Standar pelayanan publik belum diformalkan;
 - Tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya;
 - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral belum dituangkan dalam keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:
- Setiap proses kerja belum dituangkan dalam Proses Bisnis dan SOPnya belum memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi maupun dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi;
 - Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum sesuai peraturan perundangan;
 - Terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan menengah ke bawah;
 - Organisasi belum memiliki kebijakan IT (*e-gov*) yang memadai;
 - Sebagian besar proses kerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara memadai.

7. Dinas Sosial

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 13,545. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 54,180%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,813. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 62,504%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,857. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 70,856%.

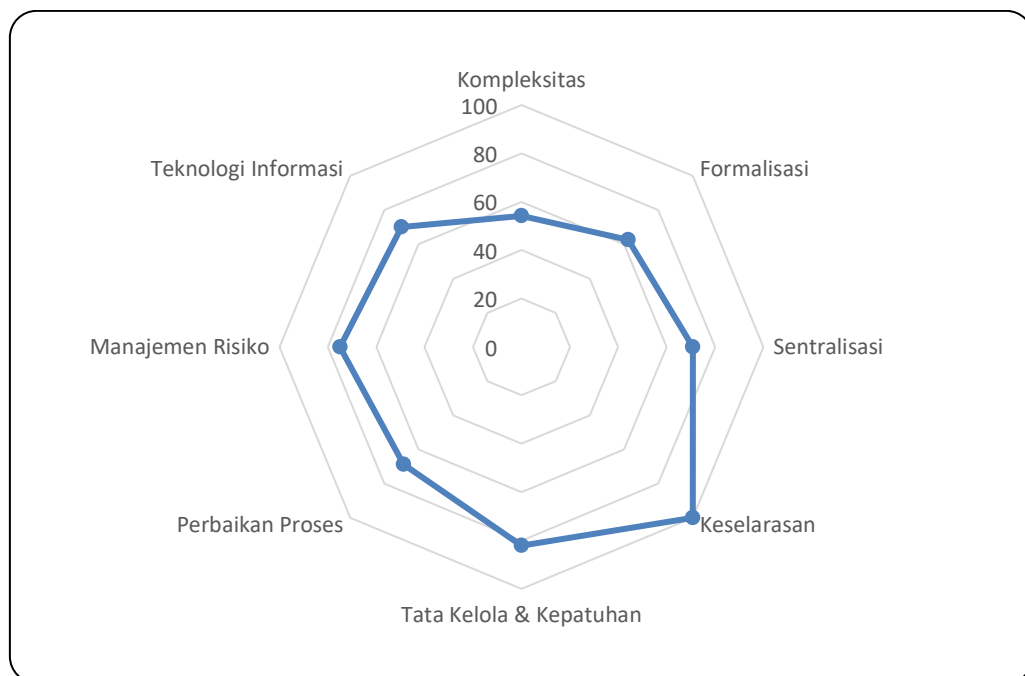
Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 100%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,213. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 82,13%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,875. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 68,75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,5. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.

- f. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 70%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Sosial Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 7.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Sosial Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 69,803 maka Dinas Sosial Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Sosial Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marjinal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, antara lain:

- Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
 - Tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena organisasi belum memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi Informasi.

8. Dinas Ketenagakerjaan

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,588. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 58,352%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,336. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 66,688%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 11,983. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 95,864%.

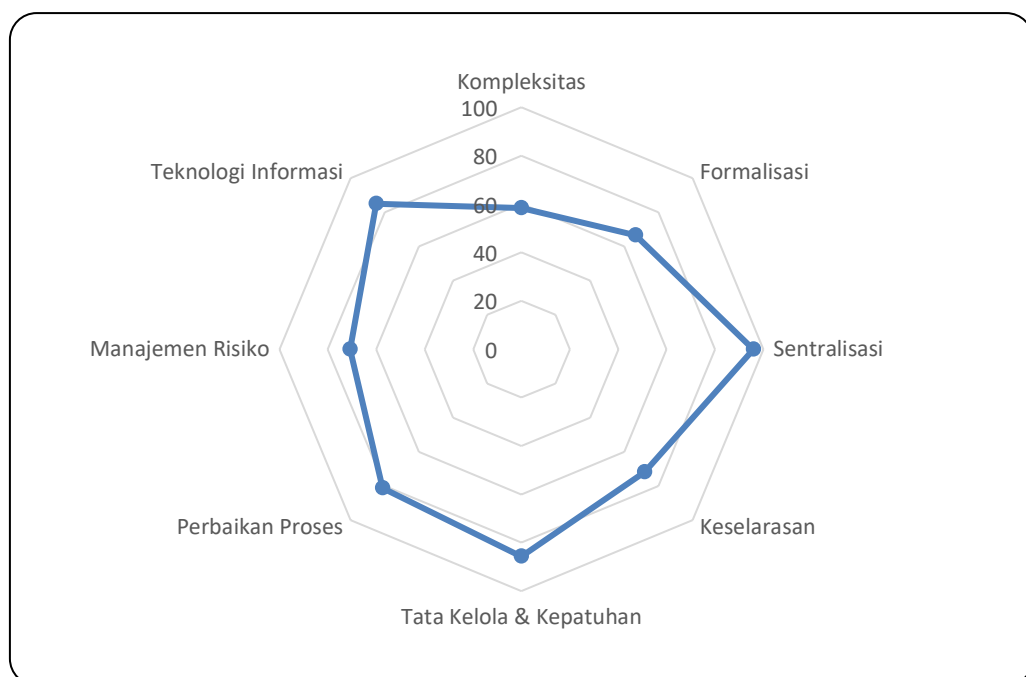
Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,191. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 71,91%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,571. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 85,71%.

- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,125. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 81,25%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,083. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 70,83%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,5. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 85%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 8.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 74,377 maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah tergolong

efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marjinal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, antara lain:
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
 - Tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:
 - Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait belum terlaksana dengan baik;
 - Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,929. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 59,716%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,034. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 64,272%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,804. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 70,432%.

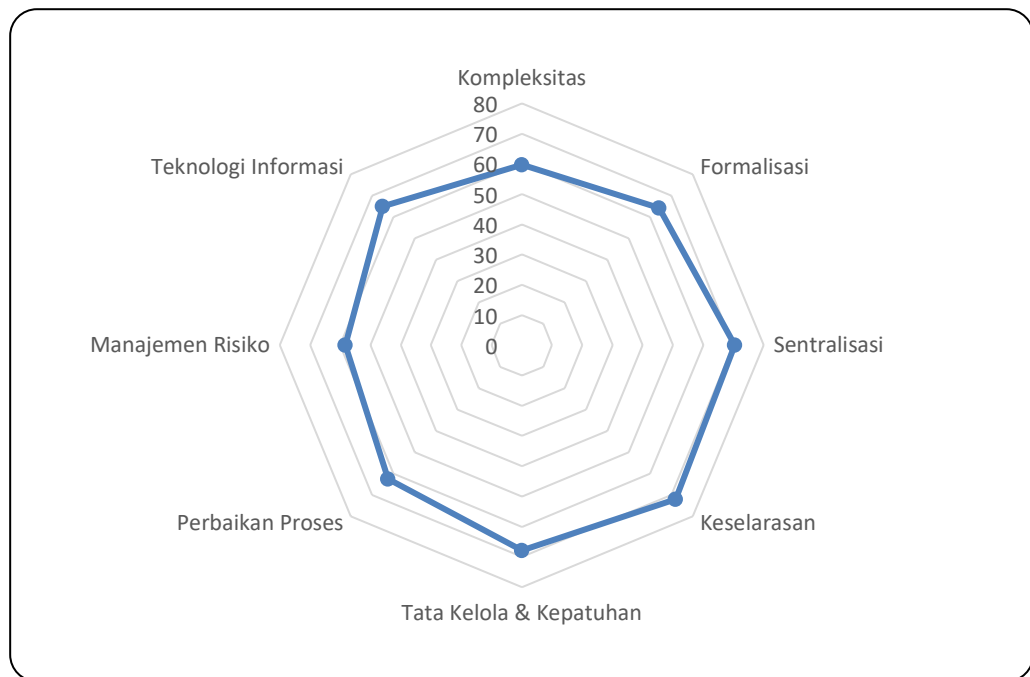
Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada

lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,191. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 71,91%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,783. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 67,83%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,25. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 62,50%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 5,832. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 58,32%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,5. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 65%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 9.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 64,323 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Jumlah instansi vertikal atau UPT dan/atau cabang dinas/UPTD melebihi kebutuhan;
 - Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;

- Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional sangat belum memenuhi kebutuhan;
 - Tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:
- Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral belum dipetakan secara jelas;
 - Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum sesuai peraturan perundangan;
 - Terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan menengah ke bawah;
 - Organisasi belum memiliki kebijakan manajemen risiko dan sistem *monitoring* risiko yang memadai;
 - Organisasi belum memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi Informasi;
 - Organisasi belum memiliki kebijakan IT (*e-gov*) yang memadai;
 - Sebagian besar proses kerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara memadai;
 - Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi belum dipublikasikan secara periodik di dalam *website* organisasi.

10. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,929. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 59,716%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,481. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 67,848%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,804. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 70,432%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

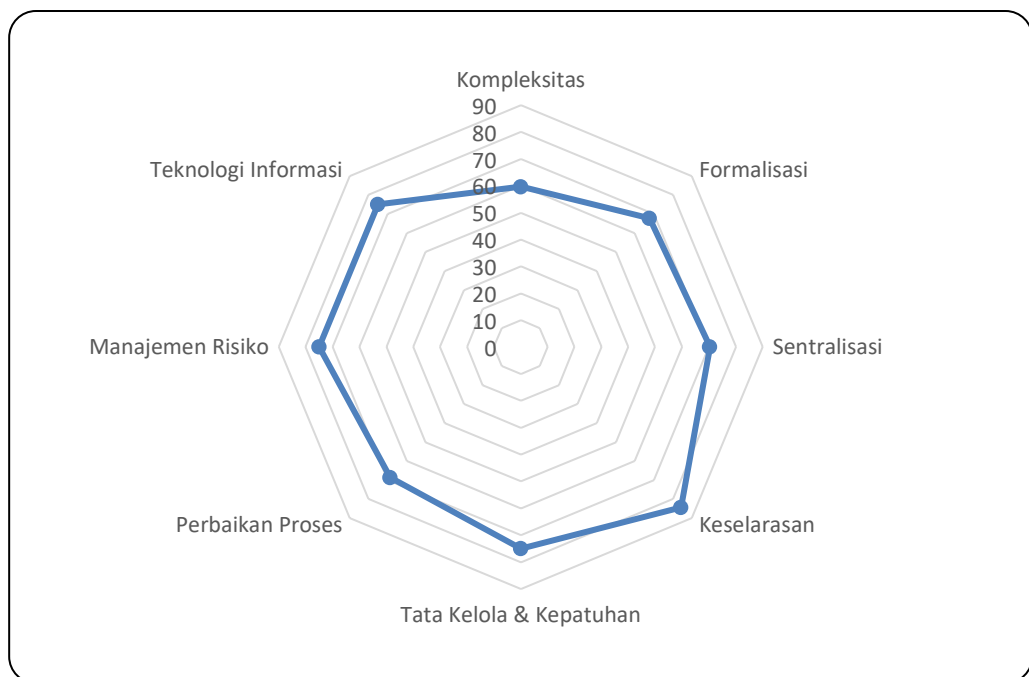
- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,44. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 84,40%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,498. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 74,98%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,875. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 68,75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,50. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.

- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,5. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 75%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi.. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar 10 yang tersaji pada halaman selanjutnya.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 70,027 maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal.

Grafik 10.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, antara lain:

- Jumlah instansi vertikal atau UPT dan/atau cabang dinas/UPTD yang ada saat ini melebihi kebutuhan;
 - Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah namun tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya;
 - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral belum dituangkan dalam keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk;
 - Pimpinan madya pada tingkat manajemen menengah tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan taktis dan manajerial.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:
- Terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan menengah ke bawah;
 - Sebagian besar proses kerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara memadai.

11. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,931. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 59,724%.

- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,588. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 60,704%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,94. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 79,52%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

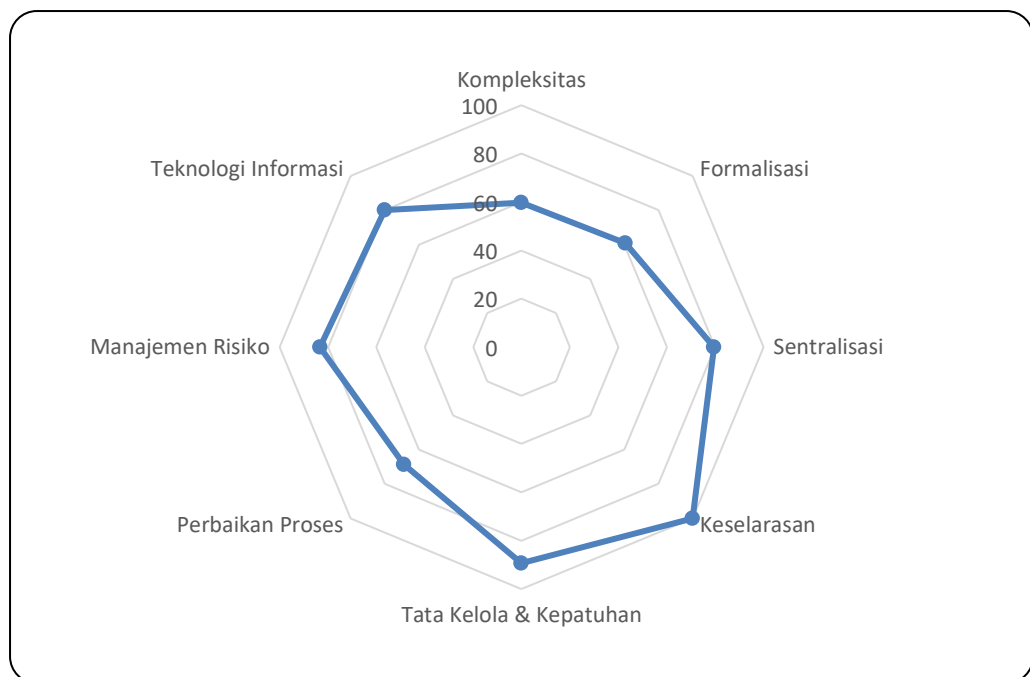
- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 100%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,930. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 89,30%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 6,875. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 68,75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,334. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 83,34%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 80%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti

dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar 11 yang tersaji pada halaman berikutnya.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 74,598 maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal.

Grafik 11.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, antara lain:
 - Instansi vertikal atau UPT yang ada saat ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebab jumlahnya dan/atau cabang dinas/UPTD melebihi kebutuhan;

- Instansi vertikal atau UPT dan/atau cabang dinas/UPTD yang dibentuk belum dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan organisasi, sebab keragaman tugas dan fungsi yang ada masih belum mengakomodir kompleksitas organisasi, banyaknya beban kerja masih diampu dalam satu bidang yang seharusnya memiliki urusan terpisah, misalnya urusan penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi tugas Bidang Penataan Ruang, namun juga masih melekat pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan sehingga struktur organisasi belum efektif akibat belum mampu mengakomodir banyaknya beban kerja yang diampu dalam satu bidang serta pola kerja yang belum ada penyeragaman atau standarisasinya;
 - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di organisasi. Diantaranya dalam hal pola koordinasi dan komunikasi serta pembakuan berbagai aspek penting di dalam organisasi yang belum ada penyeragaman atau standarisasinya;
 - Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah namun tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum sesuai peraturan perundangan;
- Organisasi belum memiliki sistem *monitoring* risiko yang memadai.

12. Dinas Lingkungan Hidup

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

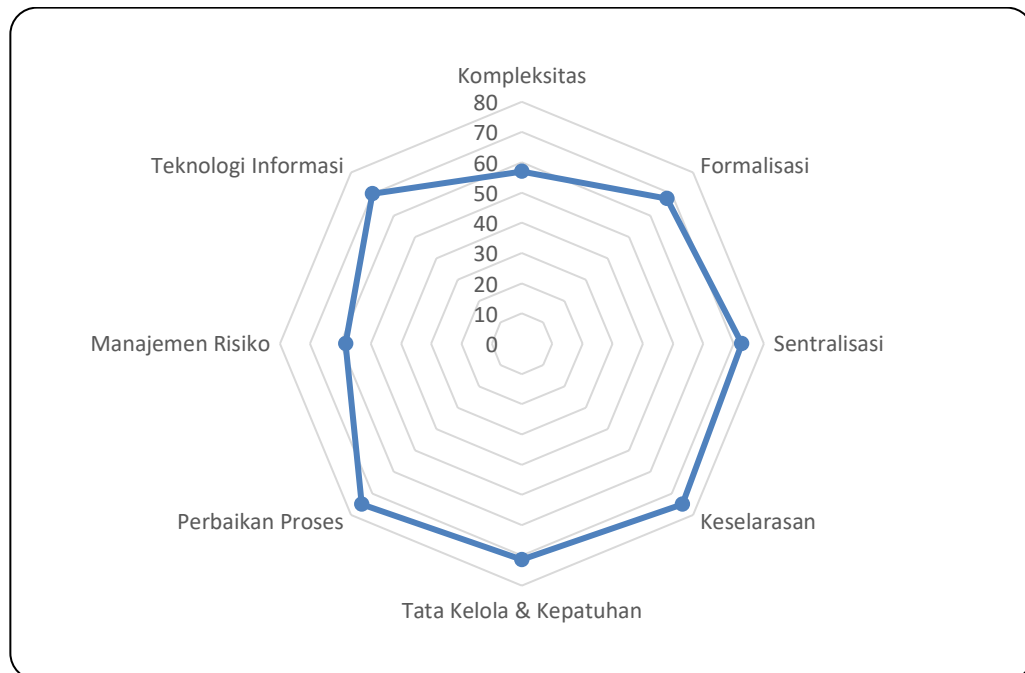
- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,234. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 56,936%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,481. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 67,848%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,088. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 72,704%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,504. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75,04%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,14. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 71,40%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,50. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 5,832. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 58,32%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 70%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 12.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 66,779 maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, antara lain:
 - Jumlah instansi vertikal atau UPT dan/atau cabang dinas/UPTD melebihi kebutuhan;
 - Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;

- Penempatan jabatan-jabatan fungsional juga belum mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional;
 - Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah namun tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena:
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah belum sesuai peraturan perundangan;
 - Organisasi belum memiliki sistem monitoring risiko yang memadai.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 17,014. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 68,056%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10,715. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 85,640%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,372. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 74,976%.

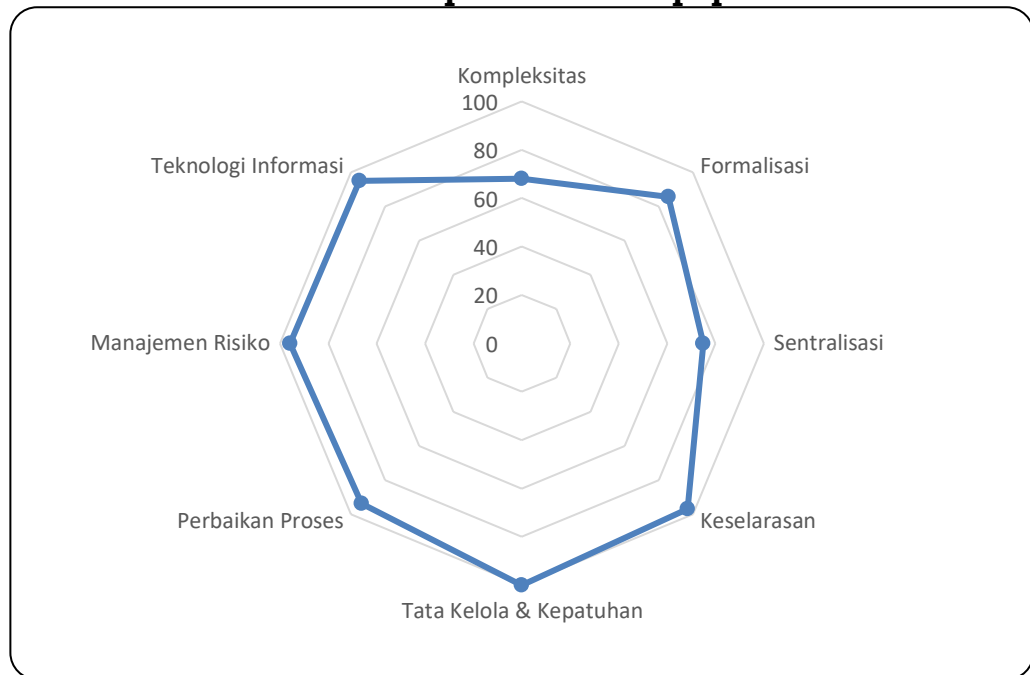
Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada

lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,688. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 96,88%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 10,003. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 100%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,375. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 93,75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,585. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 95,85%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,5. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 95%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar berikut ini:

Grafik 13.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 85,252 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 5 atau P-5 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan yang sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memandang masih diperlukannya upaya pembenahan organisasi dalam hal struktur organisasi saja, yang antara lain:

- Jumlahnya cabang dinas/UPTD melebihi kebutuhan;
- Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya;
- Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini masih perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja;

- Tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah namun tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.

14. Dinas Perhubungan

Untuk dimensi struktur organisasi, bobot penilaian terbagi pada tiga nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilai yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kompleksitas Struktur sebesar 50%, 2) Formalisasi Struktur sebesar 25%, dan 3) Sentralisasi Struktur sebesar 25%.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Kompleksitas dari 18 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 14,582. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 58,328%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Formalisasi dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 8,035. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 64,280%.
- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Sentralisasi dari 11 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 9,088. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 72,704%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Sedangkan untuk dimensi proses organisasi, bobot penilaian terbagi pada lima nilai sub dimensi dengan masing-masing bobot persentase nilainya sebesar 10% yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Keselarasan, 2) Tata Kelola dan Kepatuhan, 3) Perbaikan dan Peningkatan Proses, 4) Manajemen Resiko dan 5) Teknologi Informasi.

- a. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Keselarasan dari 7 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,504. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75,04%.
- b. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan dari 4 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,14.

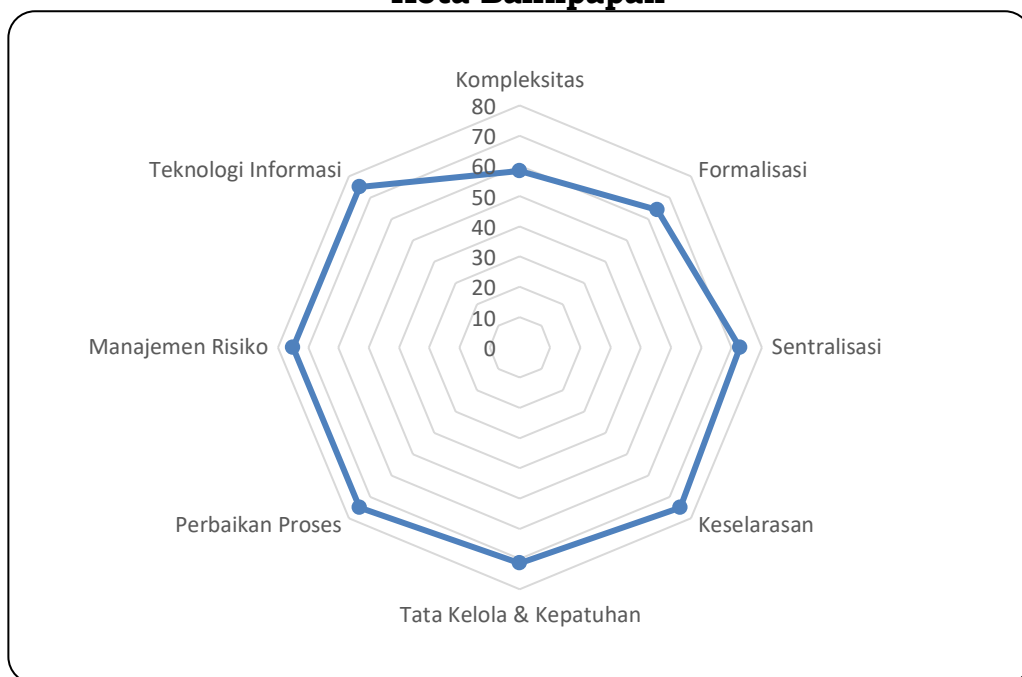
Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 71,40%.

- c. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,50. Pencapaiannya secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.
- d. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Manajemen Resiko dari 5 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,5. Pencapaian secara persentase kelembagaan adalah sebesar 75%.
- e. Perolehan nilai dari perhitungan sub dimensi Teknologi Informasi dari 6 pertanyaan dalam instrumen, berjumlah 7,5. Pencapaian secara persentase dalam instrumen, berjumlah 75%.

Perolehan nilai tersebut telah sesuai dengan jawaban atas pertanyaan terbuka dari instrumen IV yang didukung oleh bukti-bukti dokumen dan fakta pendukung dari Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan demikian, kondisi organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dari sisi masing-masing dimensi dan sub dimensi yang digunakan dalam evaluasi ini tampak pada grafik radar 14 yang disajikan pada halaman berikutnya.

Berdasarkan perolehan nilai totalnya yang sebesar 68,849 maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan termasuk dalam peringkat komposit 4 atau P-4 dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah tergolong efektif. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera melalui upaya perbaikan secara rutin yang bersifat marginal.

Grafik 14.
Grafik Radar Masing-masing Subdimensi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan



Sumber: Hasil analisis, 2022

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Balikpapan antara lain:

- 1) Secara struktur organisasi, desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan kembali karena antara lain:
 - Desain organisasi yang ada tidak bersifat kompleks;
 - Terdapat tingkatan unit organisasi yang tugas dan fungsinya hanya bersifat umum;
 - Instansi vertikal atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Jumlah instansi vertikal atau UPT dan/atau cabang dinas/UPTD melebihi kebutuhan;
 - Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan;
 - Jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan;
 - Penempatan jabatan-jabatan fungsional juga belum mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional;

- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi hingga menengah ke bawah belum dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi;
 - Tingkatan manajemen yang lebih rendah juga dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.
- 2) Sedangkan secara proses organisasi, diperlukan pembenahan antara lain karena seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi, mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga menengah ke bawah belum dipetakan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari 33 OPD yang ada, sebagian besar sudah masuk dalam tipe A sejumlah 25 OPD (76%). Kemudian OPD yang masuk tipe B sebanyak 8 OPD (21%). Sementara itu yang masuk tipe C hanya 1 OPD (3%). Skor tertinggi diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) sebesar 2.054,8.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan instrument 2, dari 33 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kota Balikpapan, 16 OPD masuk kategori sangat tinggi (48,48%), 9 OPD masuk kategori tinggi (27,27%), kategori sedang ada 4 OPD (12,12%), 1 OPD kategori rendah (3,03%) dan 3 OPD tidak mengisi (9,1%). Skor tertinggi diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Kesbangpol, yaitu 52,5.

Sementara untuk mengacu pada instrument 3, dari 33 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, satu Perangkat Daerah hasilnya berada pada Peringkat Komposit 5 (P-5) dengan skor 85,252 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Dari 33 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, 32 Perangkat Daerah hasilnya berada pada Peringkat

Komposit 4 (P-4) dengan skor antara 61 – 80, dengan interpretasi bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian yang sudah diresum pada bagian kesimpulan. Dalam proses pembentukan/penggabungan/pemisahan organisasi perangkat daerah seyogyanya memperhatikan beberapa konsiderasi berikut ini:

1. Dasar hukum (pendekatan yuridis) yaitu PP 18 Tahun 2016, khususnya pada pasal-pasal tertentu, antara lain Pasal 2, Pasal 6, Pasal 40, pasal 47 dan pasal 48.
2. Hasil evaluasi kelembagaan melalui kajian ilmiah dengan berpedoman pada minimal 3 peraturan Perundang-Undangan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016
 - b. PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018
 - c. PERMENPANRB No 20 Tahun 2018
3. Mempertimbangkan asas-asas Pembentukan Perangkat Daerah
 - a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas;
 - e. pembagian habis tugas;
 - f. rentang kendali;
 - g. tata kerja yang jelas; dan
 - h. fleksibilitas.

4. Mempertimbangkan rumpun organisasi perangkat daerah, yang terbagi dalam beberapa rumpun, antara lain:
 - a. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - b. Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - g. Perpustakaan dan kearsipan
5. Kebutuhan daerah
6. Kemampuan daerah

Mengacu pada beberapa konsiderasi diatas, maka kajian evaluasi kelembagaan memberikan rekomendasi beberapa organisasi perangkat daerah, dimana secara **tipeologi, kematangan organisasi, dimensi proses dimensi struktur** layak untuk dibentuk organisasi perangkat daerah yang baru. Berikut nama-nama OPD dimaksud:

Table 73
Daftar OPD Yang Layak Dipecah/Dipisahkan

No	Nama OPD	Instrumen 1		Instumen 2		Instrumen 3	
		Nilai	Tipeologi	Nilai	Kategori	Nilai	Rank
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan						
	a. Urusan Pendidikan	935	A	42	Tinggi	66,282	P-4
	b. Urusan Kebudayaan	847	A				

2	Satuan Polisi Pamong Praja						
	a. Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	802	A	47,5	Sangat Tinggi	69,376	P-4
b. Urusan Kebakaran	649	B					
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB)			37	Sedang	64,323	P-4
	a. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	935	A				
	b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	539	C				
	c. Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	543,4	C				
4	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan			46,5	Sangat Tinggi	70,027	P-4
	a. Urusan Pangan	627	B				
	b. Urusan Kelautan Dan Perikanan	572	C				
	c. Urusan Pertanian	554	C				
5	Dinas Lingkungan Hidup			49	Sangat Tinggi	66,779	P-4
	a. Urusan Lingkungan Hidup	1.067	A				
	b. Kehutanan	583	C				
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perindustrian			41	Tinggi	70,641	P-4
	a. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	825	A				
	b. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	363	Set. Bidang				
	c. Urusan Perindustrian	363	Set. Bidang				
7	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata			39	Tinggi	68,761	P-4
	a. Urusan Bidang Pariwisata	1067	A				
	b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	671	B				

Daftar nama-nama OPD hasil pengembangan data pada table di atas:

1. Dinas pendidikan
2. Dinas Kebudayaan
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Badan Pemadam Kebakaran
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
6. Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Dinas Kelautan dan Perikanan

8. Dinas Pertanian dan Pangan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kehutanan
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
13. Dinas pariwisata
14. Dinas Pemuda dan Olahraga

Demikian kajian kelembagaan yang dapat kami sampaikan, kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki kajian serupa dimasa yang akan datang.

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat a. ≤ 95 b. 96 - 191 c. 192 - 287 d. 288 - 383 e. >383	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2.	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar a. ≤ 10.000 b. 10.001 - 25.001 c. 25.002 - 87.002 d. 87.003 - 116.003 e. >116.003	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
3.	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar a. ≤ 2 b. 3 - 5 c. 6 - 8 d. 9 - 11 e. >11	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 - 50 c. 51 - 75 d. 76 - 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat a. ≤ 1 b. 2 - 3 c. 4 - 5 d. 6 - 7 e. >7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 - 100 c. 101 - 150 d. 151 - 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk a. ≤ 25.000 b. 25.001- 50.000 c. 50.001 - 250.000 d. 250.001 - 1.500.000 e. $> 1.500.000$	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah kepadatan penduduk a. > 550 b. 401 - 550 c. 251 - 400 d. 51 - 250 e. ≤ 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 - 20.000 c. 20.001 - 30.000 d. 30.001 - 40.000 e. >40.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
2	Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km) a. ≤ 50 b. 51 - 100 c. 101 - 150 d. 151 - 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 - 200.000 c. 200.001 - 500.000 d. 500.001 -1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 300 c. 301 - 450 d. 451 -600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 - 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk a. ≤ 25.000 b. 25.001 – 50.000 c. 50.001 – 250.000 d. 250.001 – 1.500.000 e. $> 1.500.000$	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah kepadatan penduduk a. > 550 b. 401 – 550 c. 251 – 400 d. 51 – 250 e. ≤ 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 30.000 d. 30.001 – 40.000 e. >40.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
2	Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km) a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/kota (ribu m ³) a. ≤ 180 b. 181 – 370 c. 371 – 560 d. 561 – 740 e. >740	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) a. ≤ 270 b. 271 – 550 c. 551 – 830 d. 831 – 1.100 e. >1.100	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
6	Jumlah desa/kelurahan yang rawan air a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. >600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
7	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah a. ≤ 100 b. 101 - 200 c. 201 - 300 d. 301 - 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
8	Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
9	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 120 b. 121 - 240 c. 241 - 360 d. 361 - 480 e. > 480	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
10	Jumlah luas kawasan permukiman (Ha) a. ≤ 16.000 b. 16.001 - 32.000 c. 32.001 - 48.000 d. 48.001 - 64.000 e. > 64.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
11	Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan bupati/walikota tentang fungsi dan status jalan (Km)			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
12	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 590 b. 591 – 1.100 c. 1.101 – 1.700 d. 1.701 – 2.300 e. > 2.300	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
13	Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
14	Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 900 b. 901 – 1.800 c. 1.801 – 2.700 d. 2.701 – 3.600 e. > 3.600	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
15	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 2 b. 3 - 4 c. 5 - 6 d. 7 - 8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
16	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
17	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) a. ≤ 20 b. 21 - 40 c. 41 - 60 d. 61 - 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
18	Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 90.000 b. 90.001 - 180.000 c. 180.001 - 300.000 d. 300.001 - 350.000 e. > 350.000	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16-20 e. >20	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG a. ≤ 2 b. 3 – 10 c. 11 – 50 d. 51 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Ha) a. ≤ 100 b. 101 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah total luas perumahan (Ha) a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 100.000 c. 100.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. > 200.000	200 400 600 800 1.000	39	78 156 234 312 390

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	1	2 4 6 8 10
6	Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan rencana tata ruang a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 160 d. 161 – 240 e. >240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6-8 c. 9-10 d. 11-14 e. >14	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku a. ≤ 10 b. 11-30 c. 31-60 d. 61-90 e. >90	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku a. ≤ 40 b. 41-80 c. 81-120 d. 121-160 e. >160	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 -8 c. 9 -10 d. 11 -14 e. >14	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku a. ≤ 10 b. 11 - 30 c. 31 - 60 d. 61 - 90 e. > 90	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku a. ≤ 40 b. 41 - 80 c. 81 - 120 d. 121 - 160 e. >160	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota a. ≤ 17.946 b. 17.947– 35.892 c. 35.893– 53.839 d. 53.840 –71.785 e. > 71.785	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. >70	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000			

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

	a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 250 e. >250	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001– 10.000 d. 10.001 –25.000 e. >25.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti a. ≤ 6.000 b. 6.001 – 12.000 c. 12.001– 18.000 d. 18.001 –24.000 e. >24.000	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 50.000 c. 50.001 – 450.000 d. 450.001 – 600.000 e. > 600.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301–400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. > 2.000	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa)			

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha) a. ≤ 500 b. 501 - 2.500 c. 2.501 - 5.000 d. 5.001 - 7.500 e. > 7.500	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha) a. ≤ 500 b. 501 - 2.500 c. 2.501 - 5.000 d. 5.001 -25.000 e. >25.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah kepala keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu kabupaten berdasarkan RKT (daerah asal) a. ≤ 500 b. 501 - 1.000 c. 1.001 - 2.000 d. 2.001 -5.000 e. > 5.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah kepala keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) a. ≤ 500 b. 501 - 1.000 c. 1.001 - 2.000 d. 2.001 - 5.000 e. > 5.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
5	Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan permukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP tempatan) pada tahapan kemandirian a. ≤ 500 b. 501 - 1.000 c. 1.001 - 2.000 d. 2.001 - 5.000 e. > 5.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 50.000 c. 50.001 – 450.000 d. 450.001 – 600.000 e. > 600.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301–400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. > 2.000	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa)			

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 50.000 b. 50.001 -150.000 c. 150.001 - 500.000 d. 500.001 - 1.000.000 e. >1.000.000	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil a. ≤ 10.000 b. 10.001 - 30.000 c. 30.001 - 50.000 d. 50.001 - 70.000 e. >70.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Indeks pembangunan gender kabupaten/kota a. ≤ 57 b. 58 - 65 c. 66 -70 d. 71 - 75 e. >75	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 9 b. 10 - 20 c. 21 - 40 d. 41- 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 - 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 50.000 b. 50.001 -150.000 c. 150.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. >1.000.000	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 30.000 c. 30.001 – 50.000 d. 50.001 – 70.000 e. >70.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Indeks pembangunan gender kabupaten/kota a. ≤ 57 b. 58 – 65 c. 66 –70 d. 71 – 75 e. >75	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 9 b. 10 – 20 c. 21 – 40 d. 41– 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 15 d. 16 – 30 e. >30	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km ²) a. >15.000 b. 5.001-15.000 c. 701 - 5.000 d. 201 -700 e. ≤ 200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa a. ≤ 75 b. 76 - 150 c. 151 - 225 d. 226 - 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) a. ≤60 b. 61 - 120 c. 121 - 180 d. 181 - 240 e. >240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan a. ≤ 70 b. 71 - 140 c. 141- 210 d. 211 -290 e. > 290	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah kerjasama antardesa dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 150 c. 151 – 250 d. 251 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pasangan usia subur a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.000 c. 25.001– 500.000 d. 500.001 –700.000 e. >700.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1 PKB/PLKB : 1 kelurahan)			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 50 b. 51 – 150 c. 151 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. > 30	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
4	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS a. ≤ 204 b. 205 – 404 c. 405 – 604 d. 605 – 804 e. >804	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5	Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa a. ≤ 16 b. 17 – 32 c. 33 – 48 d. 49 – 64 e. >64	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 5	200		18

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	b. 6 – 15	400	9	36
	c. 16 – 25	600		54
	d. 26 – 30	800		72
	e. >30	1.000		90
7	Jumlah keluarga			12
	a. ≤ 25.000	200	24	
	b. 25.001 – 308.222	400	48	
	c. 308.223 – 406.979	600	72	
	d. 406.980 – 613.737	800	96	
	e. >613.737	1.000	120	

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir		2	
	a. ≤ 20	200		4
	b. 21 – 40	400		8
	c. 41 – 60	600		12
	d. 61 – 80	800		16
	e. > 80	1.000		20
2	Panjang jalan kabupaten/kota (Km)		5	
	a. ≤ 460	200		10
	b. 461 – 920	400		20
	c. 921 – 1.300	600		30
	d. 1.301 – 1.800	800		40
	e. > 1.800	1.000		50

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota a. ≤ 17.946 b. 17.947– 35.892 c. 35.893– 53.839 d. 53.840 –71.785 e. > 71.785	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. >70	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000			

	a. ≤ 50 b. 51 - 100 c. 101 - 150 d. 151 - 250 e. >250	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 - 6 c. 7 - 9 d. 10 - 12 e. >12	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota a. ≤ 2.500 b. 2.501 - 5.000 c. 5.001 - 10.000 d. 10.001 - 25.000 e. >25.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti a. ≤ 6.000 b. 6.001 - 12.000 c. 12.001 - 18.000 d. 18.001 - 24.000 e. >24.000	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten /kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton) a. ≤ 60 b. 61-240 c. 241-480 d. 481-1.800 e. > 1.800	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah desa/kelurahan a. ≤75 b. 76-150 c. 151-225 d. 226-300 e. >300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota a. ≤ 5% b. 6%-9% c. 10%-12% d. 13%-15% e. >15%	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 220 d. 221 – 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 160 c. 161 – 240 d. 241 – 320 e. > 320	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 120 d. 121 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	b. 6 - 15	400	9	36
	c. 16 - 25	600		54
	d. 26 - 30	800		72
	e. >30	1.000		90
7	Jumlah keluarga			12
	a. ≤ 25.000	200	24	
	b. 25.001 - 308.222	400	48	
	c. 308.223 - 406.979	600	72	
	d. 406.980 - 613.737	800	96	
	e. >613.737	1.000	120	

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir		2	
	a. ≤ 20	200		4
	b. 21 - 40	400		8
	c. 41 - 60	600		12
	d. 61 - 80	800		16
	e. > 80	1.000		20
2	Panjang jalan kabupaten/kota (Km)		5	
	a. ≤ 460	200		10
	b. 461 - 920	400		20
	c. 921 - 1.300	600		30
	d. 1.301 - 1.800	800		40
	e. > 1.800	1.000		50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola Pemda maupun pihak swasta (unit) a. ≤ 30 b. 31– 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 - 24 d. 25- 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
14	Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9.701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

SELAIN KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	5	2 4 6 8 10
2	Panjang jalan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 460 b. 461 - 920 c. 921 - 1.300 d. 1.301 - 1.800 e. >1.800	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 - 6 c. 7 - 9 d. 10 - 12 e. >12	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (unit) a. ≤ 30 b. 31 - 60 c. 61 - 90 d. 91 - 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/ kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	1	2 4 6 8 10
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
14	Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9.701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/desa a. ≤ 30 b. 31 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
14	Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9.701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/desa a. ≤ 30 b. 31 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda a. ≤ 15 b. 16 – 45 c. 46 – 90 d. 91 – 150 e. > 150	200 400 600 800 1.000	18	36 72 108 144 180
3	Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di kabupaten/kota a. ≤ 12 b. 13 – 39 c. 40– 81 d. 82 – 138 e. > 138	200 400 600 800 1.000	14	28 56 84 112 140
5	Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i> a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤120 b. 121 – 180 c. 181 – 300 d. 301 –370 e. >370	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga yang diikuti kabupaten/kota a. ≤50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 –300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah kejuaraan olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 75 e. >75	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 –160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat kabupaten/kota yang harus diamankan a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 –900 e. >900	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat kabupaten/kota a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401 –500 e. >500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
5	Jumlah Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. ≤ 50 b. 51 – 80 c. 81 – 110 d. 111 –140 e. > 140	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160

**L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (jiwa) a. ≤ 50.000 b. 50.001- 75.000 c. 75.001 - 200.000 d. 200.001 - 700.000 e. >700.000	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah kecamatan atau nama lain a. ≤ 4 b. 5 - 9 c. 10 - 15 d. 16 - 25 e. >25	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 10 b. 11 - 20 c. 21 - 50 d. 51 -100 e. >100	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir a. ≤ 500 b. 501 - 1.000 c. 1001- 5.000 d. 5001 - 10.000 e. > 10.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km ²) a. >15.000 b. 5.001-15.000 c. 701 - 5.000 d. 201 -700 e. ≤ 200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa a. ≤ 75 b. 76 - 150 c. 151 - 225 d. 226 - 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) a. ≤60 b. 61 - 120 c. 121 - 180 d. 181 - 240 e. >240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan a. ≤ 70 b. 71 - 140 c. 141- 210 d. 211 -290 e. > 290	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 - 200.000 c. 200.001 - 500.000 d. 500.001 -1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 300 c. 301 - 450 d. 451 -600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 - 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis usaha pemanfaatan panas bumi langsung (wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya) a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.500 c. 2.501 – 10.000 d. 10.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi a. ≤ 100 b. 101 - 200 c. 201 - 300 d. 301 - 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan a. ≤ 100 b. 101 - 200 c. 201 - 300 d. 301 - 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perengkapannya) a. ≤ 1.000 b. 1.001 - 5.000 c. 5.001 - 10.000 d. 10.001 - 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 - 30 c. 31 - 40 d. 41 - 50 e. > 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota a. ≤90 b. 91 – 180 c. 181 – 270 d. 271 – 360 e. >360	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah pelaku usaha mikro a. ≤ 14.000 b. 14.001 – 28.000 c. 28.001 – 42.000 d. 42.001 – 56.000 e. >56.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 150	200	20	40
	b. 151 – 300	400		80
	c. 301 – 450	600		120
	d. 451 – 600	800		160
	e. > 600	1.000		200
5	Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota		20	
	a. ≤ 300	200		40
	b. 301 – 600	400		80
	c. 601 – 1.000	600		120
	d. 1.001 – 1.500	800		160
	e. > 1.500	1.000	200	

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)		10	
	a. ≤ 20	200		20
	b. 21 – 40	400		40
	c. 41 – 80	600		60
	d. 81 – 100	800		80
	e. > 100	1.000	100	
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota			

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis usaha pemanfaatan panas bumi langsung (wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya) a. ≤ 10 b. 11 - 20 c. 21 - 30 d. 31 - 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung a. ≤ 100 b. 101 - 200 c. 201 - 300 d. 301 - 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan a. ≤ 1.000 b. 1.001 - 2.500 c. 2.501 - 10.000 d. 10.001 - 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 - 40 c. 41 - 70 d. 71 - 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
7	Jumlah pengecer minuman beralkohol a. ≤ 3 b. 4 - 6 c. 7 - 10 d. 11 - 13 e. >13	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah a. ≤ 3.000 b. 3.001 - 5.500 c. 5.501 - 8.000 d. 8.001 - 11.000 e. > 11.000	200 400 600 800 1.000	60	120 240 360 480 600
2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah a. ≤ 8.000 b. 8.001 - 16.000 c. 16.001 - 25.000 d. 25.001 - 60.000 e. > 60.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis usaha pemanfaatan panas bumi langsung (wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya) a. ≤ 10 b. 11 - 20 c. 21 - 30 d. 31 - 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung a. ≤ 100 b. 101 - 200 c. 201 - 300 d. 301 - 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan a. ≤ 1.000 b. 1.001 - 2.500 c. 2.501 - 10.000 d. 10.001 - 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 80 d. 81 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41– 80 d. 81– 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader kabupaten/kota a. ≤400 b. 401 – 700 c. 701 – 950 d. 951 – 1.250 e. >1.250	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota			

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 2.000 b. 2.001 - 4.000 c. 4.001 - 6.000 d. 6.001 - 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 - 40 c. 41- 80 d. 81- 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader kabupaten/kota a. ≤ 400 b. 401 - 700 c. 701 - 950 d. 951 - 1.250 e. >1.250	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota			

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤120 b. 121 – 180 c. 181 – 300 d. 301 –370 e. >370	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga yang diikuti kabupaten/kota a. ≤50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 –300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah kejuaraan olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 75 e. >75	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 –160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 20 d. 21 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 - 200.000 c. 200.001 - 500.000 d. 500.001 - 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 300 c. 301 - 450 d. 451 - 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 - 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota a. ≤ 7.000 b. 7.001 – 10.000 c. 10.001 – 40.000 d. 40.001 – 60.000 e. >60.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota) a. ≤ 15.000 b. 15.001 – 50.000 c. 50.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. >200.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 60 b. 61 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 250 c. 251 – 400 d. 401 – 550 e. > 550	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) a. ≤ 550 b. 551 – 850 c. 851 – 1.150 d. 1.151 – 1.450 e. > 1.450	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah tempat pelelangan ikan a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota			

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

E. KEUANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah pengguna anggaran a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah barang inventaris milik Daerah a. ≤ 20.000 b. 20.001 – 40.000 c. 40.001 – 60.000 d. 60.001 – 80.000 e. > 80.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah objek pajak kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. > 100.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 25 b. 26 – 100 c. 101 – 500 d. 501 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

D. PERENCANAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan) a. ≤ 25 b. 26– 29 c. 30– 33 d. 34 –37 e. > 37	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah komisi DPRD kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 7 d. 8 –9 e. > 9	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
3	Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	3	6 14 18 24 30
4	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 - 40 c. 41 - 50 d. 51 - 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 - 700 c. 701 - 1.200 d. 1.201 - 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 50 d. 51 - 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

F. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 – 42 e. > 42	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 - 40 c. 41 - 50 d. 51 - 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 - 700 c. 701 - 1.200 d. 1.201 - 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 50 d. 51 -100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 - 5.000 c. 5.001 - 10.000 d. 10.001 - 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 - 40 c. 41 - 50 d. 51 - 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 - 700 c. 701 - 1.200 d. 1.201 - 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 50 d. 51 - 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 - 5.000 c. 5.001 - 10.000 d. 10.001 - 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 – 700 c. 701 – 1.200 d. 1.201 – 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 50 d. 51 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Langkah 1:
Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 - 40 c. 41 - 50 d. 51 - 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 - 700 c. 701 - 1.200 d. 1.201 - 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 50 d. 51 -100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Langkah 1:
Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 - 40 c. 41 - 50 d. 51 - 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 - 700 c. 701 - 1.200 d. 1.201 - 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 50 d. 51 -100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 - 5.000 c. 5.001 - 10.000 d. 10.001 - 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Langkah 1:
Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:

IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 - 200.000 c. 200.001 - 500.000 d. 500.001 -1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 300 c. 301 - 450 d. 451 -600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 - 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 - 40 c. 41 - 50 d. 51 - 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 - 2.000 c. 2.001 - 3.000 d. 3.001 - 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 - 700 c. 701 - 1.200 d. 1.201 - 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km ²) a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 50 d. 51 -100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 - 5.000 c. 5.001 - 10.000 d. 10.001 - 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 - 5.000 c. 5.001 - 10.000 d. 10.001 - 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain			
	a. ≤ 10	200		20
	b. 11 – 25	400		40
	c. 26 – 50	600	10	60
	d. 51 – 300	800		80
	e. > 300	1.000		100

Kabupaten Aceh Barat Daya pada Desember 2015 mempunyai 132 kelurahan/desa atau nama lain. Berdasarkan tabel di atas, skala nilai untuk indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain di Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian, perhitungan nilai indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain untuk Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Langkah 2:

Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.

3. Langkah 3:

Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
- b. Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
- c. Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- d. Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- f. Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- g. Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Dalam hal suatu Daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, Daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

4. Langkah 4:

Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang;
- b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang;
- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Komet Karyono

(INSTRUMEN 2)
 DATA KEMATANGAN ORGANISASI
 NAMA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD) :...

1. VARIABEL : PERENCANAAN

NO	URAIAN KEGIATAN DALAM DPA	TOR			METODE PENENTUAN PRIORITAS
		KETERSEDIAAN	<i>OUTCOME</i>	ANALISIS MENCAPAI <i>OUTCOME</i>	
1	2	3	4	5	6

ATATAN:

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi uraian dalam DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) Tahun Terakhir.
3. Kolom 3 : diisi ketersediaan TOR (ada/tidak ada).
4. Kolom 4 : diisi dengan (ada/tidak ada) uraian outcome dalam TOR
5. Kolom 5 : diisi dengan (ada/tidak ada) analisis yang menjelaskan kerangka logis kegiatan mampu mencapai outcome.
6. Kolom 6 : diisi dengan (ada/tidak ada) dokumen yang memuat metode dan hasil analisis penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam Renja SKPD dari seluruh usulan/kegiatan yang diusulkan atau dimunculkan pada tahun berjalan. Kolom 6 ini tidak perlu diisi per kegiatan, melainkan cukup satu kolom saja.

2. VARIABEL

: MONITORING DAN EVALUASI

NO	KEGIATAN MONEV	JADWAL	SASARAN/ FOKUS	STANDAR/ KRITERIA	ANALISIS UMPAN BALIK	TINDAKAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi kegiatan Monev yang dilakukan perangkat daerah
3. Kolom 3 : diisi jadwal modev
4. Kolom 4 : diisi sasaran atau fokus pada objek yang dimonev
5. Kolom 5 : diisi ketersediaan kriteria/standar monev (ada/tidak ada).
6. Kolom 6 : diisi ketersediaan dokumen yang bersisi umpan balik berdasarkan analisis temuan monev.
7. Kolom 7 : diisi penjelasan tindakan yang sudah dilakukan sebagai perbaikan/tindak lanjut umpan balik.

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti admininstrasi.

3. VARIABEL : PENJAMINAN MUTU PRODUK

NO	PRODUK YANG DIHASILKAN	BENTUK PENJAMINAN MUTU YANG DILAKUKAN	DOKUMEN STANDAR MUTU PRODUK	PELAKSANA PENGUJIAN MUTU	
				INTERNAL	AHLI EKTERNAL
1	2	3	4	5	6

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi produk berupa barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/perangkat daerah lain.
3. Kolom 3 : diisi bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin mutu produk (jika ada)
4. Kolom 4 : diisi keberadaan dokumen standar mutu produk (ada/tidak ada)
5. Kolom 5 : diisi tanda contrang jika pelaksana uji mutu dilakukan oleh internal (jika ada)
6. Kolom 6 : diisi tanda contrang jika pelaksana uji mutu dilakukan oleh ahli external (jika ada)

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti admininstrasi.

4. VARIABEL : STANDAR PROSEDUR OPERASI

NO	PEKERJAAN	SOP	EVALUASI SOP	PERBAIKAN SOP	MASUKAN PELANGGAN
1	2	3	4		

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi pekerjaan yang harus dibuat SOP baik layanan internal maupun external
3. Kolom 3 : diisi keberadaan SOP (ada/tidak ada) dan nomor dokumen
4. Kolom 4 : diisi kegiatan evaluasi SOP
5. Kolom 5 : diisi kegiatan perbaikan SOP
6. Kolom 6 : diisi kegiatan meminta masukan publik/pelanggan terhadap SOP

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti administrasi.

5. VARIABEL : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS JABATAN	RENCANA PENGEMBANGAN	REALISASI	EVALUASI RENCANA	EVALUASI DAMPAK
1	2	3	4	5	6

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi jenis jabatan (fungsional tertentu, strukutral, pelaksana)
3. Kolom 3 : diisi keberadaan dokumen rencana pengembangan (ada/tidak ada)
4. Kolom 4 : diisi persentase pegawai yang dikembangkan dibanding dokumen rencana
5. Kolom 5 : diisi kegiatan evaluasi dokumen rencana setiap tahun (ya/tidak)
6. Kolom 6 : diisi kegiatan evaluasi dampak pengembangan pegawai terhadap kinerja.

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti admininstrasi.

6. VARIABEL

: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH

NO	KEBIJAKAN/MASALAH STRATEGIS	METODE PENYELESAIAN	NASKAH AKDEMIK/KAJIAN/PERTIMBANGAN	KETERLIBATAN AHLI	KONSULTASI PUBLIK
1	2	3	4	5	6

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi judul perdak/perkada atau masalah strategis yang diselesaikan dalam 5 tahun terakhir
3. Kolom 3 : diisi metode penyusunan dan penyelesaian masalah yang digunakan
4. Kolom 4 : diisi ketersediaan dokumen NA/Kajian/Pertimbangan (ada/tidak ada)
5. Kolom 5 : diisi keterlibatan ahli dalam penyusunan dokumen NA/Kajian/Pertimbangan (ada/tidak ada)
6. Kolom 6 : diisi kegiatan konsultasi publik terhadap slternatisk/solusi penyelesaian yang sudah disusun (ada/tidak ada).

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti admininstrasi.

7. VARIABEL : PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SUMBER DAYA/KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA	STANDAR ANALISIS BIAYA	SOP PENGGUNAAN SUMBER DAYA	MONEV PENGGUNAAN SUMBER DAYA
1	2	3	4	5	6

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi jenis sumber daya atau nama kegiatan yang menggunakan sumber daya
3. Kolom 3 : diisi kegiatan analisis kebutuhan (ada/tidak ada)
4. Kolom 4 : diisi dokumen standar analisis biaya penggunaan sumber daya (ada/tidak ada)
5. Kolom 5 : diisi ketersediaan dokumen SOP penggunaan sumber daya (ada/tidak ada)
6. Kolom 6 : diisi kegiatan kegiatan monev penggunaan sumber daya (ada/tidak ada).

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti administrasi.

8. VARIABEL : MANAJEMEN RESIKO

NO	KEGIATAN/ PEKERJAAN	TINGKAT MANAJEMEN RESIKO		EVALUASI PENERAPAN	RESIKO YANG TERJADI
		INDIVIDU	ORAGNIASI		
1	2	3	4	5	6

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi jenis kegiatan/pekerjaan pada perangkat daerah
3. Kolom 3 : diisi tanda contreng (jika ada)
4. Kolom 4 : diisi tanda contreng (jika ada)
5. Kolom 5 : diisi ketersediaan dokumen evaluasi manajemen resiko (ada/tidak ada)
6. Kolom 6 : diisi resiko yang terjadi dalam 5 tahun terakhir (jika ada)

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti admininstrasi.

9. VARIABEL : PENGUKURAN KINERJA

NO	INDIKATOR	TARGET DALAM PEREJANJIAN KINERJA	TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA	
				DOK PERJANJIAN	DOK PERENCANAAN
1	2	3	4	5	6

PENGISIAN :

1. Kolom 1 : diisi nomor urut
2. Kolom 2 : diisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Kolom 3 : diisi target dalam dokumen perjanjian kinerja tahun N-1
4. Kolom 4 : diisi target dalam dokumen perencanaan kinerja tahun N-1
5. Kolom 5 : diisi persentase capaian target berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun N-1
6. Kolom 6 : diisi persentase capaian target kinerja berdasarkan dokumen perencanaan tahun N-1

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti administrasi.

10. VARIABEL : INOVASI PELAYANAN

NO	KEGIATAN INOVASI	KETERANGAN
1	Reflikasi	(ada/tidak ada)
2	Dokumen Rencana Inovasi	(ada/tidak ada)
3	Inovasi yang dihasilkan sendiri dua tahun terakhir	(ada/tidak ada)
4	Dokumen Inovasi Berkelanjutan	(ada/tidak ada)

PENGISIAN :

1. Coret salah satu : ada/tidak ada pada kolom keterangan
2. Dokumen inovasi berkelanjutan adalah dokumen yang memuat rencana inovasi yang akan dihasilkan setiap tahun dalam periode tertentu misalnya 5 tahun kedepan.

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti administrasi.

11. VARIABEL

: BUDAYA ORGANISASI

NO	DOKUMEN/KEGIATAN BUDAYA ORGANSASI	KETERANGAN
1	Slogan berupa spanduk/poster/tulisan/dll	(ada/tidak ada)
2	Dokumen Budaya Organisasi Resmi	(ada/tidak ada)
3	Kegiatan Internalisasi Nilai Budaya Organisasi	(ada/tidak ada)
4	Evaluasi Penerapan Nilai Budaya Organisasi	(ada/tidak ada)

CATATAN: semua pernyataan didukung bukti admininstrasi.

KUESIONER EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

(PERMENPAN-RB 20/2018)

NAMA OPD :

.....

TGL ISIAN :

.....

a. Dimensi Struktur

1) Subdimensi Kompleksitas

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
2.	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks.				
3.	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana.				
4.	Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah.				
5.	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat umum.				
6.	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik.				
7.	Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.				
8.	Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
9.	Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan organisasi.				

10.	Jumlah instansi vertikal atau Kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan.				
11.	Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan.				
12.	Jumlah Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan.				
13.	Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan pembentukan organisasi.				
14.	Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.				
15.	Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan.				
16.	Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan.				
17.	Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan.				
18.	Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.				

2) Subdimensi Formalisasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.				
2.	Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.				
3.	Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.				

4.	Rencana strategis dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi.				
5.	Kebijakan-kebijakan organisasi selalu dituangkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi organisasi.				
6.	Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.				
7.	Standarisasi pelayanan publik telah diformalkan.				

3) Subdimensi Sentralisasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.				
2.	Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.				
3.	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih rendah (di bawahnya).				
4.	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan melebihi kewenangannya.				
5.	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.				
6.	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral harus diputuskan oleh manajemen tertinggi dari instansi induk.				
7.	Pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan.				
8.	Pimpinan madya pada tingkat manajemen menengah mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan taktis dan manajerial.				

9.	Pimpinan pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis operasional.				
10.	Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah.				
11.	Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan organisasi tingkat bawah.				

b. Dimensi Proses

1) Subdimensi Keselarasan

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi				
2.	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.				
3.	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.				
4.	Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu mengacu pada proses kerja pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).				
5.	Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi telah dipetakan/didokumentasikan dengan baik.				

6.	Koordinasi antar unit kerja selalu selalu dilakukkann dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.				
7.	Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral telah dipetakan secara jelas.				
8.	Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait telah terlaksana dengan baik.				

2) Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah telah sesuai dengan peraturan perundangan.				
2.	Seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi, mulai dari tingkat manajemen tertinggi sampai tingkat manajemen menengah ke bawah telah dipetakan dengan baik.				
3.	Setiap proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia telah dijalankan secara transparan (transparansi).				
4.	Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja pada tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggungjawab pekerjaan (akuntabilitas).				
5.	Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggungjawab).				
6.	Tidak terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.				

7.	Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.				
----	---	--	--	--	--

3) Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Standar operasional prosedur selalu diperbarui secara periodik.				
2.	Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.				
3.	Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja.				
4.	Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.				

4) Subdimensi Manajemen Risiko

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Manajemen risiko organisasi telah diperkenalkan di dalam organisasi.				
2.	Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai.				
3.	Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi dengan baik.				
4.	Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun dampaknya) dengan metode yang memadai.				
5.	Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko.				
6.	Organisasi telah memiliki sistem <i>monitoring</i> risiko yang memadai.				

5) Subdimensi Teknologi Informasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi Informasi.				
2.	Organisasi telah memiliki kebijakan IT (<i>e-government</i>) yang memadai.				
3.	Sebagian besar proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai.				
4.	Sebagian besar proses kerja masih dilaksanakan secara manual.				
5.	Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan secara periodik di dalam <i>website</i> organisasi.				

**RINCIAN BUKTI & FAKTA PENDUKUNG* INSTRUMEN IV WAWANCARA EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
(PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018)**

*Dapat berupa Dokumen, Rekaman Peristiwa dalam Bentuk Gambar, Video atau Suara

NAMA OPD :

TGL EVALUASI :

a. Dimensi Struktur

No.	Pertanyaan	Jawaban yang Disampaikan	Bukti & Fakta Pendukung
1.	Kondisi umum struktur organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi:		
	a. Kompleksitas organisasi di dalam mengakomodir differensiasi (keragaman) tugas dan fungsi yang ada		
	b. Formalisasi sebagai suatu wujud penyeragaman atau standarisasi terhadap berbagai ketentuan/aturan, kebijakan, strategi, prosedur, pola koordinasi dan komunikasi, serta pembakuan berbagai aspek penting lain di dalam organisasi		
	c. Sentralisasi dalam hal kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan kebijakan serta kewenangan dan tanggungjawab untuk menjalankan keputusan dan kebijakan		
2.	Keterkaitan dan sinkronisasi struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dengan visi, misi, dan strategi organisasi.		

3.	Efektivitas struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dalam mengakomodir dan mendukung implementasi strategi dan program organisasi.		
4.	Struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan dinamis internal organisasi, terutama untuk dinamika kebutuhan internal jangka pendek maupun jangka menengah.		
5.	Keterkaitan struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi terhadap aspek-aspek pokok proses organisasi.		
6.	Struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah.		

b. Dimensi Proses

No.	Pertanyaan	Jawaban yang Disampaikan	Bukti & Fakta Pendukung
1.	Kondisi umum proses organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi		
2.	Keterkaitan dan sinkronisasi proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dengan visi-misi dan strategi organisasi		

3.	Efektivitas proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dalam mengakomodir strategi organisasi dan mendukung implementasi startegi dan program organisasi.		
4.	Proses organisasi yang ada saat baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan dinamis internal organisasi, terutama untuk dinamika kebutuhan internal jangka pendek maupun jangka menengah.		
5.	Proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka menengah.		



MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
JL. MUARA MUNTAI KAMPUS UNMUL GUNUNG KELUA, SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA, KODE POS 75114
TELP. (0541) 748662

LAPORAN AKHIR